



AKTUAL

Booklet Seri 22

Aktual

Oleh: Phoenix

Banyak hal terjadi setiap harinya dan cenderung berlalu begitu saja. Merespon langsung mungkin bisa saja, namun dengan jatuhnya makna informasi dan kebenaran di era digital ini, itu sama saja bermain latah. Sedangkan untuk menanggapi dengan kritis, tentu butuh waktu. Itupun sebelum yang tertanggap sudah tertimpa informasi lain.

Ah, itulah mengapa aku jarang menulis hal-hal aktual. Hanya saja tuntutan sebuah jabatan beberapa waktu lalu memaksaku untuk akhirnya mencipta tulisan mengenai berita aktual. Apalah artinya, semua berita yang ku bahas akan segera berlalu dengan derasnya badai informasi. Tak apa, karena toh aku menulis tanpa terlalu berharap terbaca. Anggaplah ini arsip, bahwa sesuatu pernah terjadi dan aku menanggapi.

(PHX)

Daftar Konten

5

Palu dan Arit

19

Bandung Selatan,
Mengapa Dikau Banjir

35

PKI Bangkit,
Lelucon Kah



Palu dan Arit

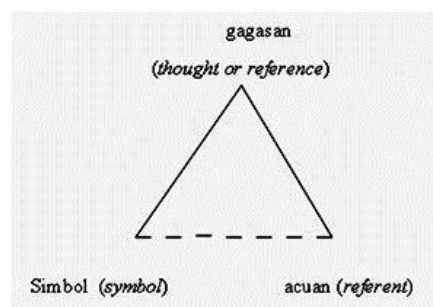
Palu dan arit sesungguhnya adalah perkakas dasar yang cukup sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan keduanya merupakan bagian dari 5 perkakas dasar dalam permainan "Harvest Moon – Back to Nature". Namun sayang, identitas suatu objek bukan sekedar ditentukan oleh dirinya sendiri, tapi dibentuk juga oleh sejarah dan paradigma yang melihatnya. Itu lah yang

terjadi akhir-akhir ini dengan munculnya beragam kejadian, dari pembubaran hingga penangkapan, hanya disebabkan sebuah logo yang mengandung dua perkakas dasar tersebut. Sebenarnya ada apa dengan palu arit? Mengapa pandangan terhadapnya begitu buruk seakan keduanya merupakan senjata iblis?

Sekedar Simbolisasi

Identitas dibentuk secara genealogis. Seperti apa kata Foucault, kita tidak mungkin membahas suatu objek diskursus tanpa meninjau konteks ruang dan waktu yang dilalui oleh objek terkait. Seperti halnya mengapa paradigma terhadap kemahasiswaan Indonesia begitu tinggi dan bahkan bercap "agent of change", semuanya ditentukan oleh alur sejarah yang terjadi sehingga akhirnya muncullah cap tersebut dalam masyarakat. Itulah mengapa analisis identitas tidak bisa serta merta hanya berdasarkan keadaan masa kini, ataupun penerjemahan cuma-cuma dari asal mula atau etimologi istilahnya. Permasalahan terminologis adalah suatu hal yang lain, yang sebenarnya hanya permukaan atau bungkus dari makna sesungguhnya identitas tersebut. Sudah banyak istilah yang mengalami pergeseran jauh dari etimologi katanya karena disebabkan mekanisme penciptaan makna yang disusun sedemikian rupa dalam ruang dan waktu yang dilaluinya.

Konsep pembentukan sejarah ini kemudian yang menentukan gagasan utama yang dibentuk oleh setiap orang ketika mempersepsi sesuatu. Contoh sederhananya, orang yang sejak kecil hidup di wilayah kumuh akan memandang biasa sampah yang menumpuk ketimbang orang yang sejak kecil hidup dalam kemewahan dan lingkungan higienis. Gagasan lah yang sering mendasari paradigma seseorang yang kemudian menentukan bagaimana ia merespon terhadap sesuatu, baik tindakan maupun perkataan. Gagasan lalu terejawantahkan dalam bentuk tanda, yang mana bisa berupa bahasa ataupun simbol. Mau tidak mau, gagasan ini lah yang kemudian menentukan bagaimana suatu objek dipersepsikan. Hal ini bisa dilihat dalam bagan berikut



Suatu objek pun menjadi tidak pernah memiliki makna tunggal, karena ia selalu ditentukan oleh persepsi. Adanya bahasa pun tetap memunculkan relativitas karena bahasa itu sendiri ditentukan oleh masyarakat yang membentuknya. Kita tidak bisa serta merta dengan kaku mengatakan bahwa definisi atau pengertian dari A adalah *bla bla bla* tanpa memahami konteks budaya dan sejarah masyarakat tempat dimana kita berada. Dan itulah yang kemudian terjadi pada simbolisasi palu arit.

Jika melihat sejarah sesungguhnya, palu dan arit mungkin bisa dikatakan tidak berhubungan langsung dengan komunisme. Palu dan arit adalah simbol yang digunakan persatuan buruh di rusia ketika melakukan revolusi bolshevik atau revolusi oktober pada 1917. Sejak terjadinya revolusi industri di Eropa pada abad ke-18, berbagai mesin-mesin produksi bermunculan yang kemudian bisa secara efektif menggantikan tenaga manusia. Hal ini pun menyebabkan upah buruh menjadi sangat rendah dan kepemilikan faktor produksi menjadi modal yang sangat penting dalam berindustri. Terciptalah kesenjangan antara pemilik modal dengan yang tidak, sehingga kemudian menciptakan kelas di masyarakat, yang kemudian diistilahkan dalam dikotomi borjuis-proletar.

Kesenjangan antar dikotomi kelas ini kemudian pun berkembang menjadi imperialisme baru yang kemudian terwujud dalam istilah kapitalisme modern. Modal yang disimbolkan dengan kepemilikan faktor produksi

menjadi kuasa tertinggi. Dengan memiliki faktor produksi, kontrol terhadap industri pun berada di tangan, padahal dunia perekonomian dan politik Eropa pada kala itu sangat bergantung pada proses industri. Hal ini yang kemudian dikritik dan dibahas panjang lebar oleh Karl Marx dalam bukunya *Das Kapital*.

Pada bukunya yang lain, Marx pun membahas lebih lanjut mengenai dikotomi kelas ini dalam *Manifest der Kommunistischen* (Manifesto Komunis). Beliau menyatakan bahwa kaum pekerja sebagai pihak yang tertindas dengan imperialisme baru ini, perlu melawan dan memperjuangkan hak-haknya. Namun hal ini hanya bisa dilakukan dengan perubahan struktur sosial melalui pengambil alihan faktor-faktor produksi oleh kaum pekerja. Apa yang diungkapkan Marx dalam manifesto ini lah yang kemudian dipakai oleh Vladimir Lenin untuk mengembangkan pemikirannya mengenai bagaimana seharusnya struktur masyarakat. Pemikiran Lenin pun membuatnya memecah Partai Buruh Sosial-Demokrat Rusia menjadi kelompok *Bolshevik* (berarti Mayoritas) dan kelompok *Menshevik* (berarti Minoritas). Lenin lah yang kemudian memperkenalkan simbol palu dan arit untuk menyatukan seluruh buruh dan petani di seluruh rusia dan dengannya memimpin revolusi besar pada 25 Oktober 1917. Revolusi yang dikenal sebagai Revolusi Bolshevik inilah yang menggulingkan kaisar Tsar Nikolas II dan menjadi hari lahirnya negara komunis Rusia.

Revolusi itu pun mengundang perhatian seluruh dunia. Ternyata kalangan pekerja punya kekuatan! Paham Lenin pun meluas dan akhirnya mentransformasi ideologi-ideologi yang bertentangan dengan kapitalisme modern menjadi satu nama: komunisme. Para penganut sosialis pun merapat, membuat mereka yang awalnya hanya menjadikan warna merah sebagai simbol, turut menggunakan palu-arit sebagai simbol. Berbagai partai komunis-sosialis

pun bermunculan di berbagai negara dengan simbol yang sama, termasuk di Indonesia. Palu dan arit pun menjadi simbol internasional untuk komunisme. Walau sebenarnya komunisme yang dimaksud cenderung mengarah pada Leninisme. Perlu diketahui terdapat perbedaan antara paham komunisme, marxisme, dan leninisme, namun akhirnya dunia melihatnya sebagai satu hal yang sama.

Perjalanan Sejarah

Seperti yang aku nyatakan sebelumnya. Identitas suatu objek tidak bisa diartikan begitu saja tanpa melihat konteks ruang dan waktu. Jika ada yang mengatakan, apa itu komunisme? Secara etimologis, sebenarnya komunisme berasal dari kata *community* atau komunitas, yang mana secara makna bisa kita artikan bahwa komunisme adalah paham yang menganggap struktur masyarakat harus berbasis komunitas. Struktur berlandaskan komunitas menentang keras adanya hegemoni berlebihan dan cenderung menganggap semua anggotanya adalah sama atau egaliter. Komunisme sebelum Marx sebenarnya sudah banyak karena sudah bukan hal baru pertentangan terhadap kuasa itu muncul. Revolusi di perancis pada abad ke-18 pun berlandaskan komunisme, yang mana rakyat menentang feodalisme yang menguasai perancis pada kala itu.

Setelah revolusi industri semakin membuat imperialisme baru semakin

merajalela. Kepemilikan terhadap faktor produksi sebagai modal/kapital pun menjadi kekuasaan baru yang menindas. Seperti yang diungkap Marx, hal ini menciptakan struktur kelas dengan hegemoni kapital yang berlebihan. Selayaknya makna komunisme pada awalnya, tentu ini hal yang sangat ditentang. Istilah ini pun bergeser menjadi ideologi anti-kapitalisme. Pada tahap lebih lanjutnya, pemahaman anti-kapitalisme ini pun diimplementasikan menjadi paham bahwa kaum pekerja harus memerjuangkan haknya dengan revolusi struktur sosial. Karena kemudian yang berhasil mengimplementasikan itu adalah Lenin, ia pun menjadi acuan sebuah negara komunis. Padahal, pemahaman Lenin cukup berbeda dengan Marx karena Lenin menganggap untuk menciptakan kesetaraan, perlu adanya penguasaan terpusat. Ini lah juga yang membuat ia memecah partai sosialis pada kala itu. Faksi Menshevik yang dipimpin oleh

Julius Martov cenderung menganggap bahwa struktur harus tetap bebas dan otonom. Karena penguasaan terpusat ini cenderung mengarah pada diktatorisme, paradigma terhadap komunisme pun bergeser lagi menjadi sebuah konsep negara yang totaliter.

Setelah Joseph Stalin mengambil alih kuasa setelah Lenin, paham komunisme pun semakin bergeser lagi menjadi apa yang mungkin lebih pantas disebut sebagai Stalinisme, bagaimana ia memegang kekuasaan absolut terhadap negara dan benar-benar menghapus semua bentuk kebijakan pasar yang sebelumnya ketika Lenin masih diterapkan. Pergeseran lain dalam komunisme yang berkembang di Rusia adalah pemahaman bahwa komunisme itu atheis alias tidak menolak adanya agama. Hal ini disebabkan pernyataan Marx yang mengatakan bahwa agama adalah candu masyarakat. Sayangnya, orang-orang terbiasa menjadikan sesuatu simbol tanpa memahami makna sesungguhnya, seperti apa yang aku jelaskan sebelumnya bagaimana simbol itu dipengaruhi konteks waktu dan ruang. Padahal apa yang dimaksud oleh Marx hanyalah bahwa agama dianggap menjatuhkan rasionalitas dan meruntuhkan semangat juang para pekerja. Generalisasi yang dilakukan oleh Marx sebenarnya disebabkan agama pada kala itu memang cenderung menghasilkan orang-orang yang menyerah pada keadaan. Padahal agama dalam beberapa hal justru menganjurkan untuk terus memperjuangkan hak juga. Pada akhirnya, pemahaman terhadap

komunisme pun jadi gado-gado dengan ragam bumbu: pemberontak lah, atheis lah, diktator lah, dan lain sebagainya. (Pembahasan lebih detail mengenai pemikiran Marx bisa baca tulisan [Okie Fauzi Rachman : Apa Itu Marxisme dan Relevansinya Dengan Atheisme](#))

Setelah perang dunia ke-II, Uni Soviet sebagai salah satu pemenang perang semakin punya kuasa dan memperluas invansinya. Stalin yang begitu percaya diri dan meremehkan kekuatan kapitalisme yang mulai tumbuh subur pun memulai perang dingin dengan menyerang korea selatan. Amerika dan aliansinya pun mulai menyebar kemana-mana untuk mencegah komunisme menyebar dan memperluas kekuatan ekonominya melalui penguasaan perdagangan. Indonesia yang baru saja merdeka dan masih tidak stabil pun tidak luput menjadi objek.

Jika melihat secara ideologis, komunisme juga bukan hal yang baru di Indonesia. Walaupun secara umum nusantara menganut sistem kerajaan, sesungguhnya pandangan dan budaya gotong royong dan semacamnya merupakan salah satu bentuk komunisme sederhana yang terkontrol karena tidak adanya penindasan seperti yang terjadi pada feodalisme kerajaan-kerajaan di Eropa. Ketika Indonesia terjajah, tentu saja yang bisa melawannya adalah konsep kesetaraan dan pertentangan terhadap hegemoni struktur sosial. Apa yang dilakukan VOC selama 3 abad di Indonesia adalah

penindasan terhadap pekerja dengan penguasaan terhadap modal atau faktor produksi. Ketika terjadi perlawanan menjelang kemerdekaan pun, unsur komunisme tidak bisa dilepaskan dari paham yang digunakan untuk menggerakkan rakyat Indonesia kala itu. Memperjuangkan hak dan kelas adalah konsep utama dari komunisme. Secara intelektual, paham ini pun tumbuh oleh beragam tokoh, dari Tan Malaka, HOS Tjokroaminoto, bahkan Ir. Soekarno.

Secara ideologis, unsur komunisme pun tetap masuk dalam konsep negara Indonesia. Kita tidak bisa menafikan bahwa pasal keempat dan pasal kelima Pancasila adalah konsep dasar komunisme. Penjajahan yang dialami Indonesia, baik oleh Belanda ataupun Jepang, pun merupakan penjajahan pekerja, dengan adanya kerja rodi, tanam paksa, dan sebagainya. Perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan pun merupakan bentuk lain dari perjuangan kelas. Jika dikupas lebih mendalam, konsep penolakan terhadap kekuasaan berlebihan komunisme tidak berbeda banyak dengan Pancasila. Pancasila merupakan konsep gabungan 3 ideologi besar Indonesia: nasionalisme, agama, dan komunisme, yang kemudian diwujudkan dalam konsep Nasakomnya Soekarno.

Negara baru punya banyak tantangan. Karena keadaannya yang tidak stabil, modal adalah yang sangat dibutuhkan untuk segera melakukan stabilisasi dan pembangunan yang cepat. Padahal, satu-satunya cara

menyuntikkan modal dengan cepat adalah dengan membuka lebar-lebar pintu investasi, sedangkan itu sama saja dengan mempersilakan masuk penjajah-penjajah baru dalam bentuk yang berbeda. Itulah yang sangat ditentang oleh Ir. Soekarno, membuatnya sangat dibenci barat dan cenderung anti-kapitalis. Paham komunisme yang terbawa oleh Soekarno adalah konsep komunisme murni, bersama dengan nasionalisme dan islam, konsep yang mengedepankan hak-hak sosial, walau tentu implementasinya banyak penyimpangan, seperti dengan pengangkatan diri sebagai Presiden seumur hidup pada 1963. Sayangnya, di sisi lain ada komunisme bentuk ekstrim yang terbawa oleh Muso dalam bentuk Partai Komunis Indonesia (PKI).

PKI pada awalnya banyak membantu dalam memerangi kolonialisme. Bermula dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) yang dibentuk oleh sosialis Belanda, Henk Sneevliet, pada 1914. Ketika terjadi revolusi Bolshevik, orang-orang ISDV menganggap apa yang terjadi di Rusia harus diikuti oleh Hindia. Awalnya ISDV membentuk blok bersama Sarekat Islam untuk memerangi Belanda. Setelah mengalami berbagai perombakan, ISDV berubah menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1924. Bisa dikatakan bahwa PKI memang menganut marxisme-leninisme agak ekstrim, karena apa yang mereka kemukakan selalu pemberontakan untuk kesetaraan pekerja. Memang sebelum kemerdekaan PKI sangat membantu

dalam memerangi kolonialisme, namun setelah kemerdekaan, apalagi ketika Muso datang pada 1948 dan merombak total PKI dengan platform, *"harusnya perjuangan anti-imperialis Indonesia bersatu dengan Soviet Unie yang memelopori perjuangan melawan blok imperialis pimpinan Amerika Serikat."* Hal inilah yang memicu pemberontakan Madiun pada 1948, yang mana Muso memanfaatkan tidak stabilnya Indonesia untuk mengambil alih kuasa.

Paradigma terhadap PKI pun kemudian menjadi negatif dan dianggap ancaman, namun paska pemberontakan 1948, PKI tidak sampai dibubarkan. Beberapa tahun kemudian di bawah pimpinan D.N. Aidit, PKI bangkit lagi namun dengan bentuk dan gerakan yang berbeda. PKI versi Aidit sangat mendukung pemerintah yang mana memang sangat anti-barat dan mendukung persatuan kelas. Apalagi dengan konsep nasakom dan demokirasi terpimpinnya Soekarno, PKI sangat mendukung penuh dan tidak memperlihatkan bahwa akan membawa kekacauan lagi seperti sebelumnya. Soekarno pun menjadi akrab dengan PKI dan membuat Soekarno semakin dibenci oleh pendukung barat. Entah kenyataan sesungguhnya seperti apa, memang PKI bukan lagi menjadi ancaman ketika dibawa Aidit.

Namun, semua berubah ketika 30 September 1965. 7 Jenderal dibunuh pada satu malam.

Entah kenyataannya seperti apa. Terlepas dari kontroversi kebenarannya,

PKI kemudian dituduh menjadi dalang utama. Apa yang terjadi kemudian pun sudah menjadi hafalan mati orang-orang orde baru: Super Semar keluar, Soeharto mengambil alih, menyelamatkan bangsa, membubarkan PKI, dan seterusnya dan seterusnya. Selama 30 tahun berikutnya Soeharto tetap berada dalam kuasa dengan konsep pembangunannya yang begitu dipuja hingga akhirnya jatuh pada 1998.

Apa yang sangat terkenal dalam orde baru adalah doktrinasi yang dilakukan oleh Soeharto untuk membenci komunisme bersenjatakan pancasila melalui P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila), propaganda-propaganda anti-PKI, dan juga pembungkaman jurnalistik. Pemerintahan orde baru memanfaatkan fakta kekejaman PKI untuk menciptakan rasa takut yang kemudian ditumbuhkan menjadi rasa benci untuk menutup semua rasionalitas terhadap paham tersebut. Semua hal yang dianggap berhubungan dengan PKI, termasuk simbol palu arit pun dianggap tabu dan harus disingkirkan. Keberhasilan propaganda pada masa Soeharto membuat mata rakyat Indonesia hanya satu terhadap komunisme: Lawan. Selama 30 tahun, satu generasi penuh, masyarakat Indonesia dicuci otak dengan pandangan bahwa PKI ataupun komunisme adalah musuh yang harus diberantas.

Paradigma yang dibangun mengatasnamakan pancasila ini sudah sebegitunya menghakimi komunisme.

Apa yang dipandang oleh masyarakat orde baru bisa dilihat secara sederhana dalam buku Sari Pendidikan Pancasila

oleh Ir. Heru Santoso, M.Hum, yang meringkas perbandingan ideologi negara sebagai berikut:

5 AZAS KEBUTUHAN HIDUP MANUSIA	 KOMUNISME	 PANCASILA	 LIBERALISME
AZAS KETUHANAN	Atheis (tidak mengenal Tuhan)	Monotheis (Sesuai keyakinan Agama)	Sekular (Agama dipisahkan dari urusan Negara)
AZAS KEMANUSIAAN	HAM diabaikan semua harus patuh pada doktrin penguasa negara / partai pusat (politik biro)	HAM dilindungi tanpa melupakan kewajiban Asazi khusus bagi kaum minoritas	HAM dilindungi secara mutlak meski kadang ada dominasi dan kaum mayoritas
AZAS PERSATUAN	Nasionalisme Di tolak	Nasionalisme Di junjung tinggi	Nasionalisme Di abaikan
AZAS DEMOKRASI	Keputusan di tangan Pimpinan Partai Komunis yang berkuasa	Keputusan Melalui Musyawarah dan Mufakat, atau lewat pemungutan Suara (referendum / voting)	Tidak ada Musyawarah dan Mufakat, semua keputusan ditentukan dengan Pemungutan Suara Langsung
	Dominasi Partai	Tidak Ada Dominasi Partai	Dominasi Suara Mayoritas
	Tidak ada Oposisi Hanya ada Satu Partai	Ada Oposisi tergantung alasan, sikap dan pilihan Partai	Ada Oposisi (di luar pemerintahan) dan Partai Penguasa (pemerintah)
	Tidak ada Perbedaan Pendapat Semua Harus Patuh pada Doktrin	Bebas Mengeluarkan Pikiran dan Pendapat sesuai Aturan	Bebas Mengeluarkan Pikiran dan Pendapat tanpa tergantung aturan (bebas/liberal)
AZAS KEADILAN	Hanya Untuk Kepentingan Negara	Untuk Kepentingan Seluruh Rakyat, Bangsa & Negara	Hanya Untuk Kepentingan Kaum Mayoritas & Penguasa

Sekarang?

Ketika kita bertanya mengenai PKI pada orang-orang berumur 30 tahun ke atas saat ini, apa yang diketahuinya adalah kengerian pemberontakan PKI yang begitu kejam membunuh 7 jenderal dan mengancam Indonesia pada 1965. Ketika bertanya mengenai komunisme, apa yang dijawab mungkin akan seperti tabel perbandingan di atas. Kecuali tentu saja kalangan akademis atau jurnalistik yang akan secara rasional mencari fakta sesungguhnya dan membersihkan diri dari doktrin orde baru. Mengapa kemudian diskusi-diskusi, acara-acara, tulisan, dan lain sebagainya tentang komunisme ataupun marxisme bermunculan dan cenderung diinisiasi anak muda, karena anak-anak 30 tahun ke bawah tidak terpapar banyak oleh doktrin orde baru. Mereka cenderung

mengalami masa orde baru ketika masih anak-anak dan belum bisa berpikir banyak, apalagi sekitar 90an, orde baru berada diujung kejatuhan.

Sayangnya, Indonesia saat ini tengah dipegang oleh generasi orde baru. Artinya apa, tokoh-tokoh maupun penggerak-penggeraknya merupakan orang-orang yang lahir pada awal atau pertengahan orde baru sehingga doktrin dan propaganda orde baru masih tertancam keras dalam lautan gagasan di pikiran masing-masing. Ketika generasi muda ataupun kalangan akademis memunculkan segala hal terkait PKI, sejarah telah membuat masyarakat akan memandang itu sebagai ancaman. Persepsi yang muncul pun bukan rasionalitas yang muncul dari pikiran,

namun perasaan jijik, takut, benci, dan lainnya yang ditanamkan oleh propaganda orde baru. Propaganda yang menyerang perasaan dan alam bawah sadar memang mematikan rasionalitas itu sendiri. Hal ini terbukti pada propaganda Nazi yang sangat memuja Hitler dengan menumbuhkan rasa cinta dan harapan pada ras sendiri dan Hitler sebagai yang bisa memimpin mereka menuju kejayaan.

Sekarang katanya adalah era reformasi, yang mana kebebasan berpendapat dibebaskan seluas-luasnya selama tidak mengancam negara. Namun, persepsi 'mengancam negara' saat ini masih mengarah tajam pada doktrin orde baru: komunisme dan semacamnya. Itulah yang aku anehkan ketika Soeharto jatuh, malah muncul UU Nomor 27 tahun 1999 yang menambahkan pasal 107 KUHP dengan ayat-ayat yang lebih spesifik. Salah satunya adalah, "Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun". Ayat tersebut, beserta 5 ayat lainnya yang serupa ditambahkan pada KUHP bahkan setahun setelah reformasi.

Sekarang katanya adalah era reformasi, tapi reformasi apa? Reformasi tatanan masyarakat? Sayangnya, tindakan dan pandangan masyarakat

bukan ditentukan oleh tatanan yang mengaturnya, tapi oleh paradigma dan gagasan yang dimilikinya. Sedangkan paradigma itu sendiri sangat ditentukan oleh sejarah, yang mana cuci otak besar-besaran terjadi pada masa orde baru. Paradigma pun tidak bisa direformasi semudah itu, perlu penyelamatan satu generasi penuh agar stigma buruk komunisme bisa hilang sepenuhnya, ketika generasi-generasi orde baru sudah menyingkir dari tatanan masyarakat.

Mau bersifat akademis atau tidak, ketika doktrin sudah menutup mata rasionalitas, segala bentuk atribut atau acara yang dianggap berhubungan dengan komunis langsung mengalami penghakiman sepihak. Hal ini bisa jadi juga disebabkan oleh adanya kesenjangan antara dunia akademis dengan masyarakat. Kenapa? Karena ketika dunia akademis dinetralkan sedemikian rupa melalui metodologi ilmiah sehingga membuat segala bentuk subjektivitas disingkirkan, kalangan akademisi tidak bisa mengomunikasikan itu kepada masyarakat. Ketika kalangan akademis cukup rasional memandang komunisme, masyarakat tidak. Terkait itu sendiri pun, belum tentu semudah itu dilakukan, karena apa yang tertancap di masyarakat bukanlah sekedar pengetahuan, tapi paradigma.

Ketika berbicara tentang tatanan masyarakat pun, khusus untuk mengenai pandangan komunisme sendiri, tidak ada yang signifikan. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang paham komunis tetap diberlakukan, walau

memang mengalami perubahan sedikit. Perubahan ini tertuang dalam TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

"Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/ Marxisme/ Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini. ke depan diberlakukan dengan bekeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia."

TAP ini seakan tidak pernah disosialisasikan, karena ketika melihat tren yang muncul di media, masyarakat masih menganggap TAP MPRS yang lama masih berlaku tanpa ada perubahan apapun, dan dijadikan senjata utama untuk bertindak seenaknya memerangi komunisme. Padahal, dalam pasal itu perlu kita garis bawahi, "...diberlakukan dengan bekeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia." Pertanyaannya, apakah selama ini dilakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia? Bisa ku beri beragam contoh betapa tidak menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia kejadian pembubaran atas stigma PKI yang terjadi akhir-akhir ini:

#	Hari	Tanggal Acara	Acara	Lokasi	Kota	Propinsi	Larangan oleh
1	Wednesday	11-Mar-2015	Pemutaran Film Senyap	Kampus Universitas Islam Negeri (UIN)	Yogyakarta	DIY	Forum Umat Islam Yogyakarta menggeruduk acara pemutaran tersebut
2	Sunday	17-May-2015	International Day Againsts Homophobia dan Transphobia (IDAHOT)	Malang, Jawa Timur	Malang	Jatim	FPI Jatim dan Forum Takmir Malang
3	Wednesday	30-Sep-2015	Diskusi Setengah Abad Gendjer-Gendjer	Kampus Universitas 17 Agustus 1945	Banyuwangi	Jatim	Kodim dan Kepolisian
4	Thursday	22-Oct-2015	Diskusi G30S 1965	Ubud Writers & Readers Festival	Ubud	Bali	Pemerintah Daerah
5	Monday	9-Nov-2015	Pumutaran dan Diskusi film Prahara Tanah Bongkoran	Kampus Universitas 17 Agustus 1945	Banyuwangi	Jatim	Pemda dan Kepolisian
6	Thursday	12-Nov-2015	Diskusi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)	Universitas Diponegoro	Semarang	Jateng	Rektorat Kampus
7	Friday	27-Nov-2015	Diskusi publik "Teror Paris, Ujaran Kebencian dan Ancaman ISIS di Indonesia"		Jakarta	DKI Jaya	Polis, berdasarkan keberatan FPI
8	Tuesday	8-Dec-2015	Diskusi Drama #50 Tahun 1965 FTJ	Taman Ismail Marzuki	Jakarta Pusat	DKI Jaya	Polda Metro
9	Wednesday	10-Feb-2016	Lokakarya LGBT	Hotel Cemara, Menteng	Jakarta Pusat	DKI Jaya	Polda, alasan ancaman FPI
10	Monday	22-Feb-2016	Diskusi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966	Bukit Cengang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk	Bukittinggi	Sumbar	Warga
11	Saturday	20-Feb-2016	Festival Belok Kiri	Taman Ismail Marzuki	Jakarta Pusat	DKI	Polisi dan Ormas
12	Thursday	17-Mar-2016	Pemutaran Film "Buru: Tanah Air Beta"	Goethe Institut, Menteng	Jakarta Pusat		Polisi dan FPI
13	Wednesday	23-Mar-2016	Monolog Tan Malaka	Pusat Kebudayaan Prancis atau IFI	Bandung	Jabar	Ormas Islam - FPI

Logo palu dan arit memang tidak disebutkan dilarang sama sekali dalam pasal tersebut. Tapi seperti yang aku jelaskan sebelumnya, identitas tidak bisa dilepaskan dari konteks ruang dan waktu. Sejarah telah membuat logo palu dan arit merupakan simbolisasi mutlak dari kampanye PKI. Masyarakat pun tidak mau tahu apa makna sesungguhnya dari ajaran komunisme/leninisme/marxisme. Yang ada pada otak reptil mereka adalah satu: komunisme adalah haram (titik).

Lantas sebagai generasi muda yang gelisah dan haus akan pengetahuan dan ekspresi, apa yang harus kita lakukan? Selama KUHP hasil revisi UU No. 27/1999 dan TAP MPRS No. 25/1966 (beserta perubahannya) tetap berlaku dan melarang keras paham komunisme/leninisme/marxisme, secara hukum kita tidak bisa berbuat banyak. Apalagi dengan kentalnya doktrin sejarah di kepala masyarakat, aku rasa kita yang harus mengalah. Revisi KUHP lagi yang diwacanakan DPR RI sejak tahun 2013 pun masih menganggap bahwa komunisme adalah ancaman negara. Seperti apa yang tertuang dalam naskah akademiknya yang dipublikasikan pada 2015 yang mana tertulis:

“Mempertahankan larangan penyebaran ajaran komunisme dan marxisme dinilai tidak bertabrakan dengan hak asasi manusia, dengan beberapa alasan sebagaimana dimuat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. *bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;*
2. *bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;*
3. *bahwa paham dan ajaran komunisme/marxisme/Leninisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang bertuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia;”*

Apakah benar komunisme itu mengancam atau tidak, tidak ada benar ataupun salah sebenarnya. Karena ideologi sangat bergantung pada yang membawa. Tidak hanya komunisme, ideologi lain seperti islam, liberal, ataupun sekular pun akan menjadi ancaman bila dibawa secara ekstrim dan jauh dari prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun sayang, referensi gagasan yang menjadi fondasi berpikir alam bawah sadar masyarakat tidak bisa dilepaskan oleh sejarah. Tentu memang banyak fakta-fakta baru yang telah mengungkap kebenaran tragedi 1965, namun rasionalitas tidak semudah

itu menyentuh dunia gagasan atau paradigma. Mau semua akademisi mengatakan dari A sampai Z apa sesungguhnya komunisme atau marxisme atau leninisme itu, di mata masyarakat tetap satu: Komunisme adalah ancaman.

Kecuali.

Kita lewatkan satu generasi penuh hingga semua bekas-bekas orde baru bersih dan generasi reformasi yang memegang Indonesia, mungkin aturan-aturan yang mengancam kebebasan berpendapat di Indonesia bisa lebih diperbaiki dan disesuaikan. Sekarang? Aku rasa memang kurang bijak dan tidak ada gunanya menentang budaya masyarakat, kecuali jika kita punya cara untuk mencuci otak ulang semua pandangan tentang komunisme ke pemahaman yang sebenarnya. Ah, tapi sepertinya itu mustahil. Jika kalian generasi muda yang haus akan pengetahuan, maka ciptakanlah diskusi-diskusi itu sendiri, antar teman, komunitas, atau internal organisasi. Buku-buku atau tulisan-tulisan mengenai komunisme/ marxisme/ leninisme sudah banyak beredar dan bukanlah hal yang sulit untuk mencarinya. Memang adalah suatu ketidakadilan ketika kegiatan terbuka dibubarkan begitu saja secara sepihak tanpa ada proses demokratis di dalamnya, namun masyarakat bukanlah ditentukan oleh aturan atau kebenaran, tapi paradigma dan ideologi yang dipegangnya. Jika masyarakat masih

menganggap komunis itu ancaman, maka itu lah yang akan berlaku.

Jika pemerintah memang cukup netral untuk menyelesaikan hal ini, ku rasa usaha-usaha untuk menertibkan ormas-ormas yang bertindak sewenang-wenang sudah dilakukan sedari dulu. Tapi sayang, sepertinya masalah pajak dan pembangunan jakarta lebih penting daripada kebebasan berpendapat. Dari pihak legislatif, jika memang revisi KUHP masuk prolegnas (program legislasi nasional) DPR RI 2015-2019, maka tinjaulah kembali pertimbangan mengenai apakah komunisme memang sebegitunya harus dilarang keras atau tidak. Tentu pemerintah harus bersikap netral, namun sudahlah, seperti yang aku bilang lagi, masyarakat tidak ditentukan oleh aturan atau kebenaran, tapi paradigma dan ideologi yang dipegangnya. Diadakannya Symposium 1965 pada pertengahan april lalu merupakan satu langkah besar untuk menyelesaikan kasus yang selama ini masih tertutupi paradigma, namun sayang, pemerintah seakan belum menunjukkan keberanian mengingat begitu banyaknya kecaman masyarakat.

Jika benar-benar ingin memerangi komunisme, maka seharusnya serikat-serikat buruh sudah dibubarkan sedari dulu. Tapi tentu masyarakat tidak mengerti, bahwa komunisme terkait erat dengan itu, bahwa palu dan arit itu sendiri adalah simbol dari buruh. Yang diketahui hanyalah, komunisme adalah ancaman.

Sedih? Tentu. Tapi aku bisa apa?
Aku hanya mahasiswa matematika yang
senang bertanya.

Salam pembebasan

Menteri Pusat Studi Arsip dan Kajian Kebijakan Kabinet KM ITB 2016

PHX

Tambahan:

Berbicara mengenai dunia akademik sendiri, sebenarnya kenyataannya tidak se-ideal itu. Aku teringat salah seorang kawan di ITB yang dipanggil oleh rektorat hanya karena ia memakai kaos palu-arit pada foto di buku osjur. Pada kasus lain, ketika pesta literasi 2016 yang diadakan ISH Tiben, pihak panitia diperingatkan oleh pihak kampus bahwa jika ada konten terkait PKI atau atheisme, komisi disiplin akan bertindak.



Bandung Selatan, Mengapa Dikau Banjir

Mungkin belum lepas dari ingatan kita bahwa bulan Maret lalu, daerah Bandung Selatan kembali tergenangi oleh banjir. Dari BNPB, sekitar 15 daerah di Kabupaten Bandung terendam banjir yang kedalamannya berkisar antara 0.8 hingga 3 meter. Berbagai instansi dan pihak berbondong-bondong memberikan bantuan pada masyarakat yang terkena dampak banjir, apalagi bisa dikatakan banjir di daerah Bandung Selatan pada tahun ini termasuk yang paling parah dalam beberapa tahun terakhir. Perhatian masyarakat Bandung pun cukup teralihkan dengan apa yang terjadi.

Mangkok yang Padat

Apa yang biasa disebut sebagai 'Bandung Selatan' ketika terjadi permasalahan banjir sesungguhnya sebuah area di Kabupaten Bandung yang tergabung dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu. Sungai Citarum sendiri merupakan sungai terbesar dan terpanjang di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mengalir lintas Kabupaten/Kota. Bersumber dari Situ Cisanti di kaki Gunung Wayang, sungai ini mengalir ke bagian tengah provinsi Jawa Barat, melwati waduk Cirata dan Jatiluhur hingga terus ke utara dan bermuara di Laut Jawa di daerah Muara Gembong. Aliran Citarum yang memanjang hingga total sekitar 269 km ini kemudian dapat dibagi menjadi 3 DAS besar, yakni DAS Hulu, DAS Tengah, dan Das Hilir. DAS Hulu meliputi mata air Gunung Wayang hingga ujung Sauguling, Das Tengah

Banjir yang terjadi di Bandung Selatan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang terjadi satu-dua kali saja. Ia terjadi tiap tahun. Bahkan secara ekstrim bisa dikatakan bahwa masyarakat Bandung Selatan begitu terbiasa dengan banjir yang terjadi sehingga sudah menjadi rutinitas yang tak harus dikhawatirkan lebih. Jika ditarik mundur pun, pola tahunan banjir yang terjadi sudah muncul sejak tahun 1980 atau dengan kata lain 3 dekade yang lalu. Tentu hal ini akan menimbulkan pertanyaan sederhana, ada apa dengan Bandung Selatan sehingga banjir selalu menjadi rutinitas yang tak kunjung usai?

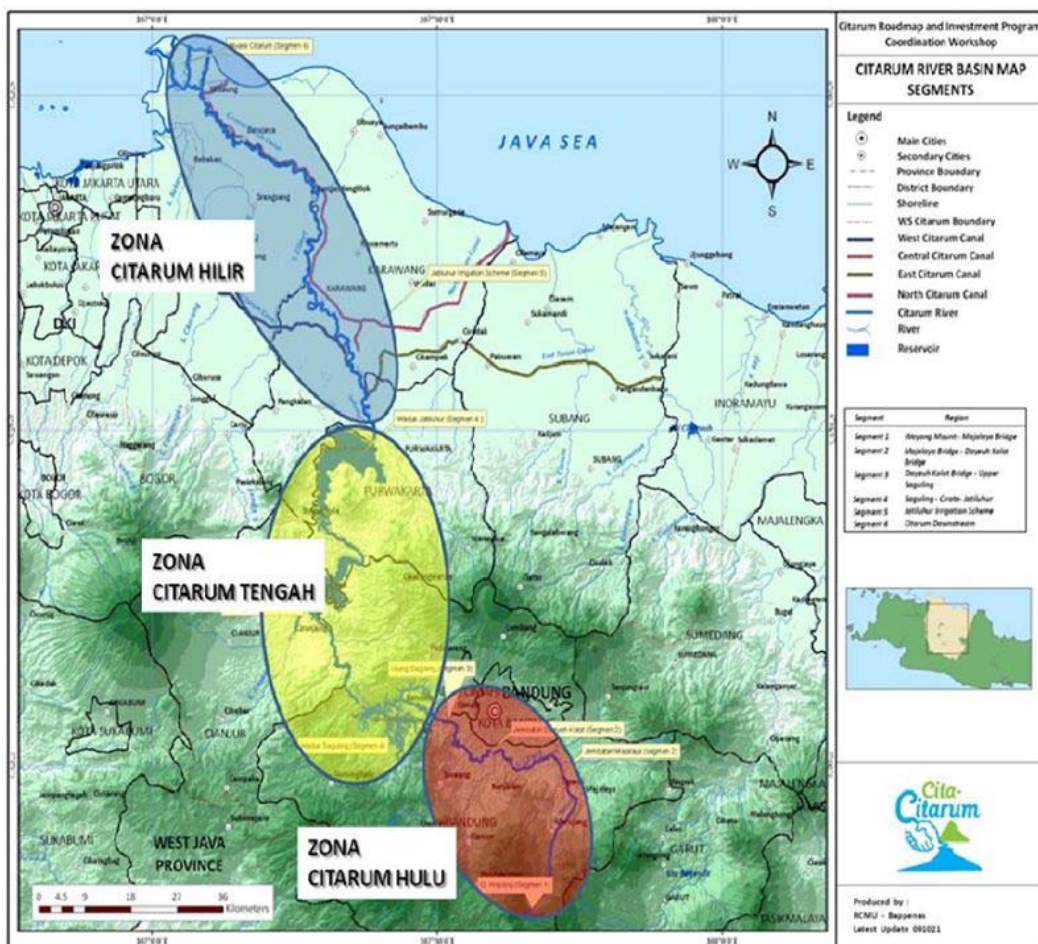
meliputi 3 waduk (Sauguling, Cirata, Jatiluhur), dan DAS Hilir meliputi sisanya hingga muara.

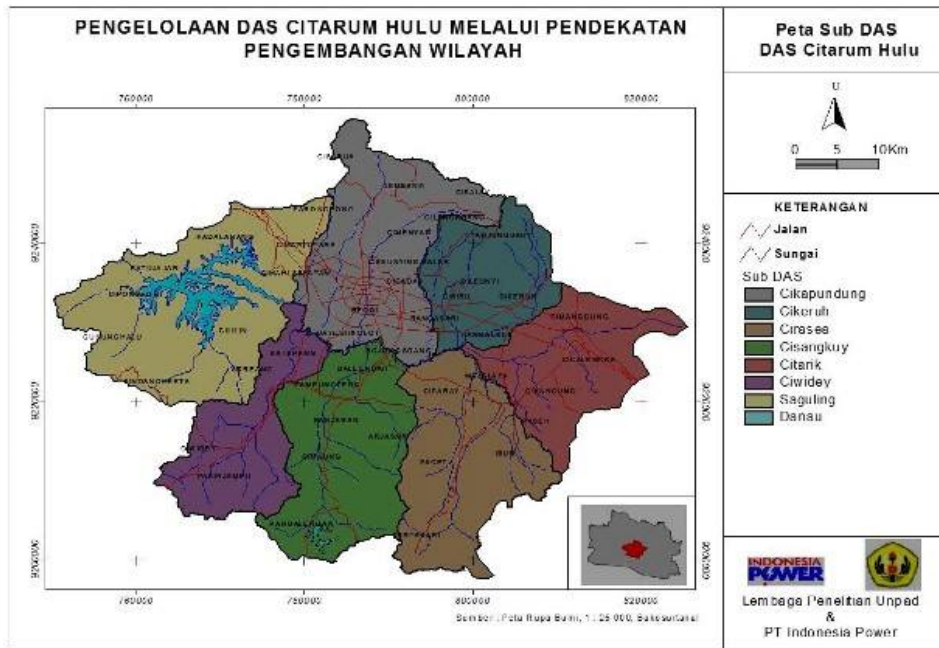
Pada dasarnya sungai Citarum merupakan komponen alam yang cukup penting untuk berbagai keperluan dan manfaat. Sungai ini mengairi ratusan ribu hektar sawah, terutama di sekitar Pantai Utara Jawa Barat melalui jaringan irigasi Jatiluhur, sumber air bagi penduduk Bandung dan Jakarta, serta Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menghasilkan daya 1.400 MW untuk pulau Jawa dan Bali. Namun, akibat kurang baiknya penataan dan pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, sungai Citarum menjadi sumber masalah, yang mana salah satunya adalah banjir.

Banjir merupakan hal utama yang menjadi rutinitas DAS Citarum bagian

hulu. Kondisi geografisnya membuat terciptanya genangan adalah suatu hal yang wajar. Secara geografis, DAS Citarum Hulu berada di 107° 15' 46,27" - 107° 57' 1,99" Bujur Timur dan 6° 43' 8,65" - 7° 14' 32,09" Lintang Selatan dengan luas area 180,270 hektar. Elevasinya berkisar antara 600-2.300 m di atas permukaan laut yang mana elevasi terendah berada di tengah DAS dan

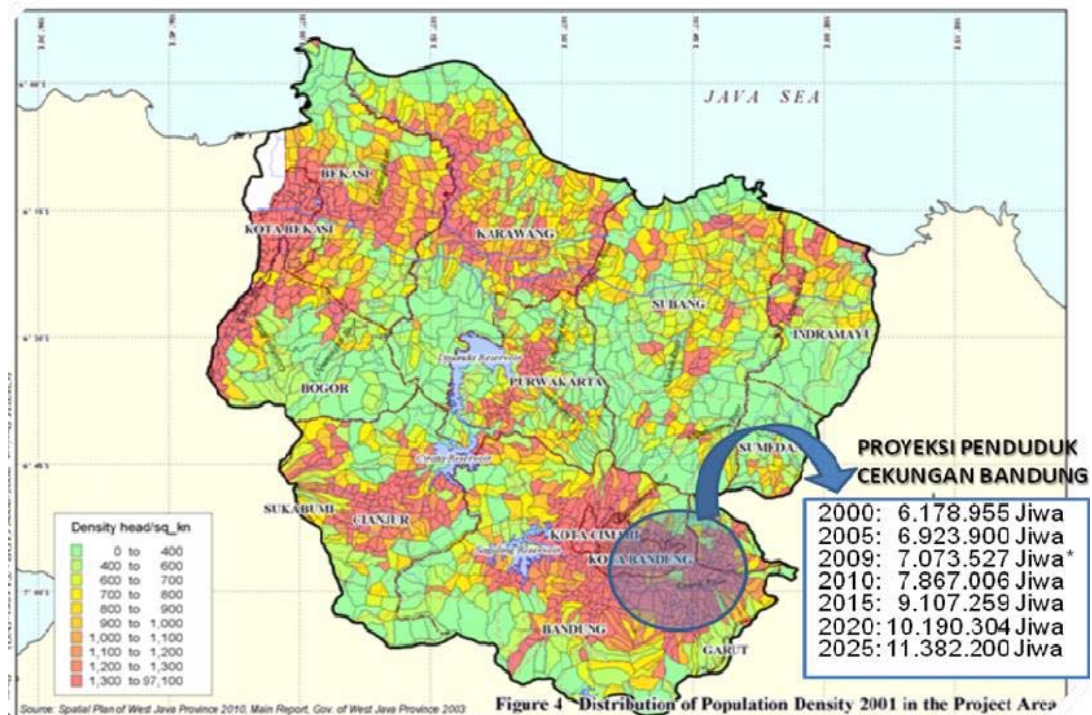
elevasi tertinggi berada di daerah utara dan selatan. Hal ini membuat DAS Citarum Hulu berbentuk cekung seperti mangkok. Kawasan sekitar DAS ini pun sering disebut dengan cekungan Bandung. Sekitar 86 ribu hektar lahan di bagian tengah merupakan daerah daratan yang sangat landai, yang mana kemiringan lereng kurang dari 8%.





Kondisi geografis seperti ini seharusnya memang membuat DAS Citarum bagian hulu dijadikan kawasan yang tidak seharusnya dipadati oleh pemukiman. Bahkan jika perlu pemanfaatan ruang pada DAS Citarum Hulu tidak diperuntukkan untuk kawasan pemukiman dan fungsi kawasan lindungnya lebih dimaksimalkan. Apa yang terjadi di DAS Citarum Hulu memang bisa dikatakan diakibatkan oleh memadatnya kawasan

permukiman di DAS tersebut sehingga pertumbuhan penduduknya tidak terkendali. Penduduk di cekungan Bandung itu tumbuh pada kisaran 3% per tahun, sebagai pengaruh migrasi ke daerah dengan pertumbuhan yang cepat. Apalagi mengingat cekungan ini berbatasan dengan kota Bandung sehingga wilayah ini dijadikan wilayah pengembangan yang fasilitas umumnya berorientasi langsung ke Kota Bandung.



Dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk di kawasan cekungan bandung atau sekitar DAS Citarum Hulu diproyeksikan akan bertambah pesat dari waktu ke waktu. Berkembangnya pemukiman tanpa perencanaan yang baik pada zona Citarum Hulu pun membuat fungsi kawasan lindung baik hutan maupun non hutan jadi berkurang, budi daya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi, perubahan tata guna lahan, pencemaran baik dari industri maupun rumah tangga, kadar erosi yang semakin tinggi, hingga berujung pada sedimentasi yang berlebihan.

Melihat dari segi iklim pun, cekungan Bandung, beserta wilayah sekitar Bandung lainnya termasuk

wilayah beriklim tropis dengan temperatur yang hangat dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Beberapa wilayah daratan tinggi di sekitar Cekungan Bandung dengan ketinggian lebih dari 1500 m dari permukaan laut beriklim sedang dengan temperatur yang sejuk sepanjang tahun. Secara umum, pola hujan di Cekungan Bandung tergolong pola musonal dengan musim hujan di awal dan akhir tahun serta musim kemarau di pertengahan tahun. Bahkan beberapa kali curah hujan yang terjadi di sekitar Bandung melebihi curah hujan normal bahkan hingga mencapai ambang batas ekstrim. Secara geografis sendiri, curah hujan tertinggi berada pada sekitar daerah Solokan Jeruk dan Majalaya.

Monitoring Curah Hujan Bulanan 2013 Terhadap Nilai Ambang Batas Ekstrimnya
Bandung



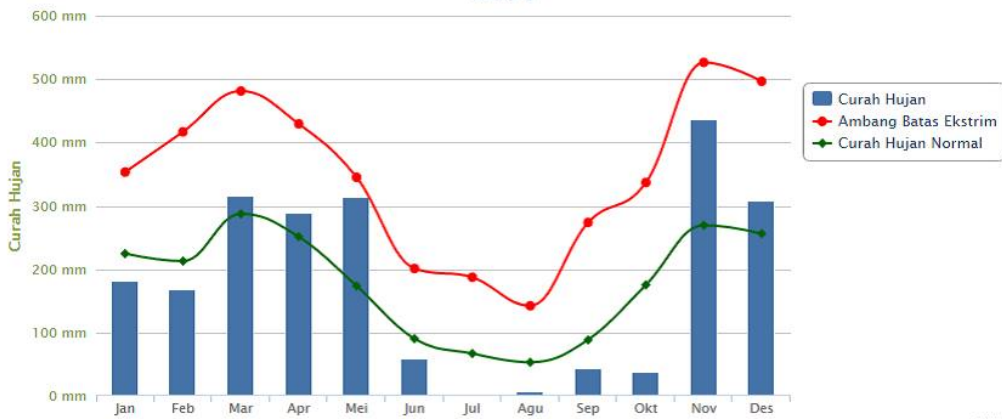
BMKG

Monitoring Curah Hujan Bulanan 2014 Terhadap Nilai Ambang Batas Ekstrimnya
Bandung

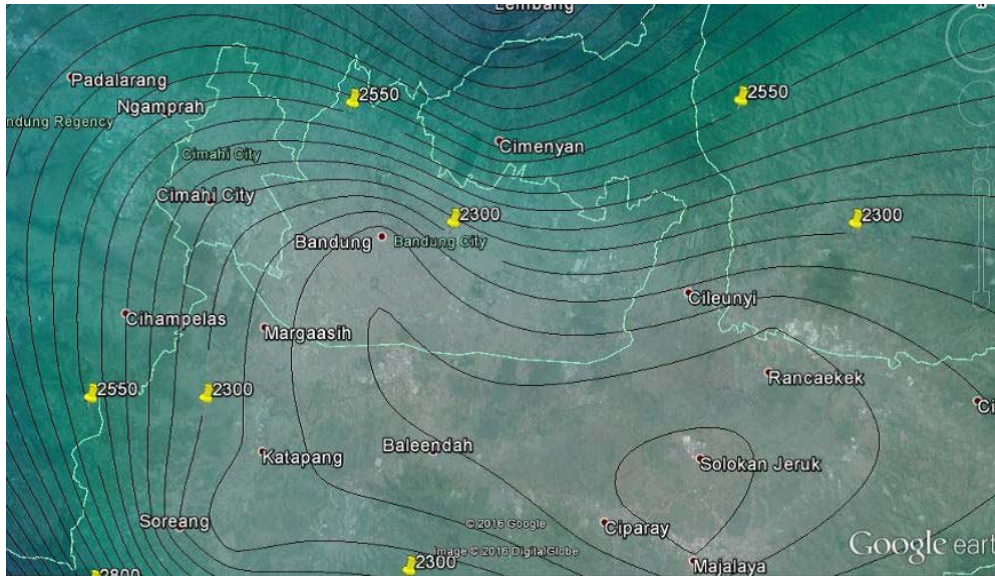


BMKG

Monitoring Curah Hujan Bulanan 2015 Terhadap Nilai Ambang Batas Ekstrimnya
Bandung



BMKG



Banjir, sebuah Kewajaran

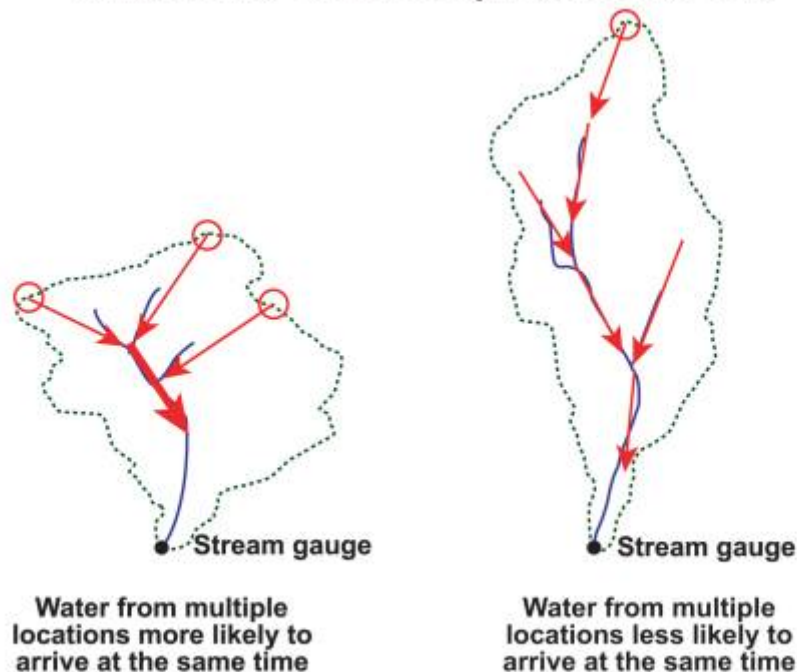
DAS Citarum Hulu, terutama kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Baleendah, merupakan daerah yang selalu menjadi langganan banjir dari tahun ke tahun. Banjir ini pun selalu tepat terjadi sekitar maret atau desember. Dengan melihat kondisi daerah itu sendiri seperti yang terpaparkan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa hal ini disebabkan oleh gabungan beberapa hal sekaligus.

Melihat dari curah hujan, jelas bahwa curah hujan di sekitar Bandung relatif tinggi sekitar Maret dan Desember. Ketika air hujan turun, ada tiga kemungkinan kemana air hujan ini akan pergi, yaitu mengalir melalui sungai, meresap ke tanah, atau tergenang. Untuk kondisi yang pertama, sungai memiliki kapasitas aliran maksimal yang bisa dialirinya. Ketika jumlah air yang mengalir (debit) melebihi kapasitas

maksimal, maka air tersebut akan meluap ke daerah sekitarnya yang memiliki ketinggian rendah. Apabila ketinggian daratan sekitar sungai tidak terlalu jauh dengan permukaan tertinggi aliran sungai, maka jumlah daratan yang tergenang akan semakin luas.

Terciptanya luapan air sungai sebenarnya juga dipengaruhi oleh struktur anak sungai terkait yang menjadi sumber aliran sungai utama. Anak-anak sungai tentu akan meningkatkan debit air sungai. Ketika anak sungai ini bergabung ke sungai utama di beberapa tempat berbeda yang cukup jauh, maka peningkatan jumlah debit air sungai utama tidak akan terlalu naik secara drastis, sebaliknya, hal itu akan mengakibatkan meningkat drastisnya debit air sungai utama pada satu lokasi.

Influence of Basin Shape on Peak Flow



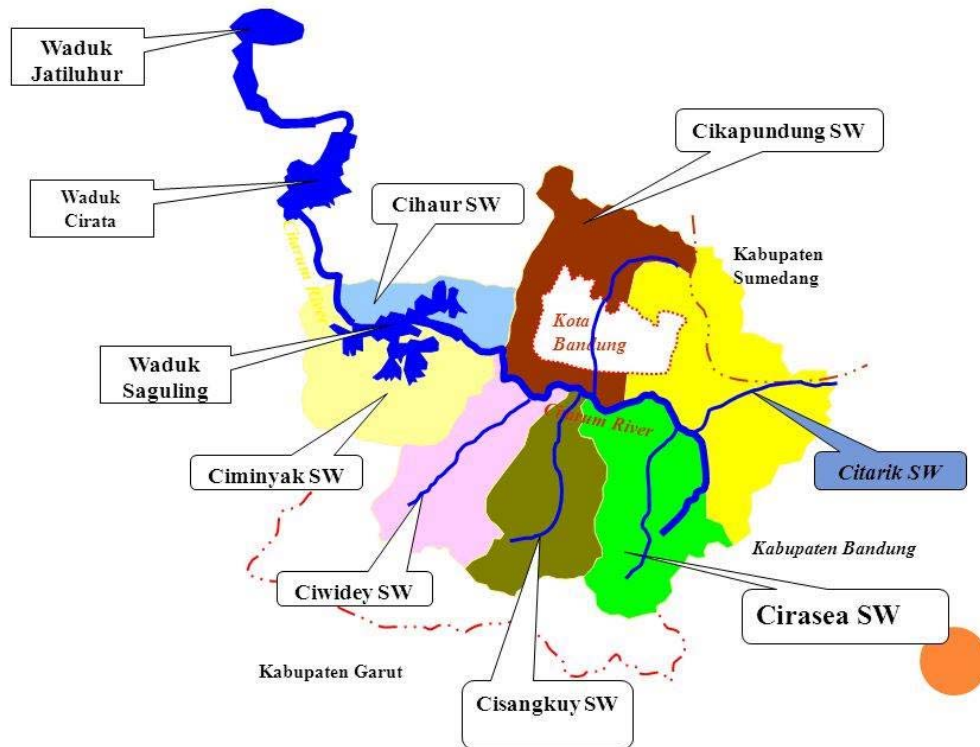
©The COMET Program

Kondisi kedua sangat ditentukan oleh jumlah tutupan lahan yang dapat menyerap air. Tentu kapasitas serap lahan memiliki keterbatasan sehingga pada jumlah tertentu, air akan tetap menciptakan genangan, namun jumlah tutupan lahan ini akan menentukan *runoff* (air larian) atau limpasan air yang mengalir di permukaan. Air yang tidak terserap ke tanah tentu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, yang secara ideal seharusnya tertampung oleh sungai. Ketika curah hujan cukup tinggi, di tambah dengan tutupan lahan resapan yang kecil, maka jumlah air larian akan semakin tinggi. Apabila air larian ini bisa mengalir ke sungai dan kapasitasnya mencukupi, tentu tidak akan menjadi

masalah, namun bila tidak, akan tercipta genangan, yang mana merupakan kondisi ketiga.

Sekarang ketika melihat Citarum, khususnya bagian hulu, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, kita ketahui bahwa curah hujan di sektiar Bandung memang relatif tinggi sekitar Maret dan Desember. Hal ini tentu akan mengakibatkan debit air Citarum akan meninggi secara signifikan pada dua waktu tersebut. Apalagi ketika melihat struktur dari Citarum sekitar DAS Hulu, banyaknya anak sungai yang bertemu di satu lokasi yang berdekatan membuat peningkatan debit air di lokasi tersebut menjadi sangat tinggi ketika hujan.

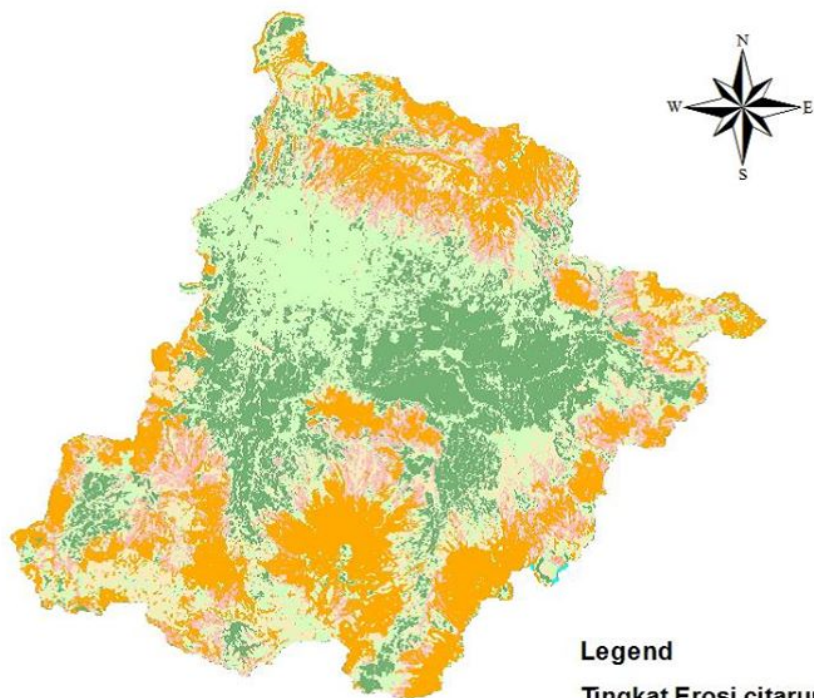
PETA DAS CITARUM BAGIAN HULU



Di sisi lain, padatnya kawasan pemukiman di sekitar DAS menimbulkan terjadinya degradasi fungsi konservasi sumber daya air seperti luas lahan kritis yang meningkat. Artinya, tutupan lahan resapan menjadi sangat kecil sehingga air hujan otomatis langsung menjadi air larian yang entah tergenang, atau mengalir ke sungai utama Citarum. Padahal, elevasi lahan lebih rendah dari elevasi muka air banjir sungai, sehingga air larian tidak bisa mengalir sehingga menjadi genangan. Selain itu, kapasitas sungai Citarum sendiri juga semakin mengecil karena pendangkalan akibat sedimentasi dari

pencemaran limbah, baik dari pemukiman, industri, maupun pertanian, ataupun dari kadar erosi yang semakin tinggi karena gundulnya hutan yang seharusnya bisa menjaga kekuatan tanah. Kedua hal ini, baik sedimentasi maupun erosi diakibatkan oleh banyaknya alih fungsi lahan sekitar hulu Citarum dari hutan menjadi sawah, perkebunan, atau pemukiman. Selain itu, sampah padat yang terbuang ke sungai pun mengakibatkan kapasitas sungai menurun karena ruang yang seharusnya bisa diisi oleh air jadi terpenuhi oleh sampah.

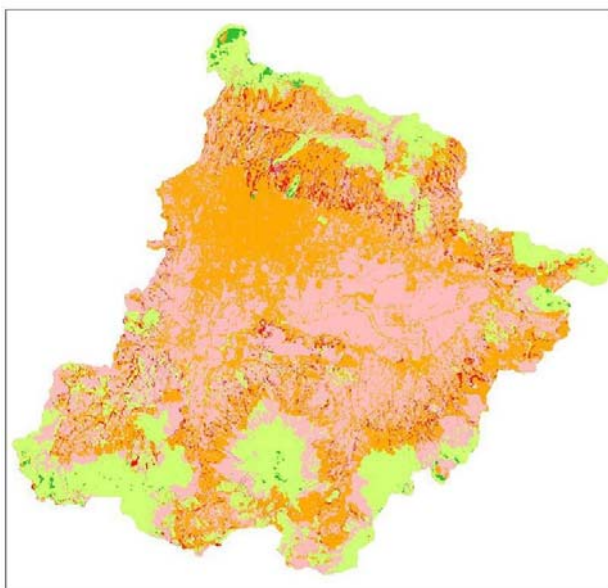
PETA TINGKAT EROSI DAS CITARUM 2014



- Legend**
Tingkat Erosi citarum
Kls_erosi
- Sangat Ringan
 - Ringan
 - Sedang
 - Berat
 - Sangat Berat

0 2,875,750 11,500 17,250 23,000 Meters

PETA LAHAN KRITIS DAS CITARUM



- Legend**
lhn_kritis_citarum
- <all other values>
- Kls_lhkrit**
- Sangat Kritis
 - Kritis
 - Agak Kritis
 - Potensial Kritis
 - Tidak Kritis

0 2,250,500 9,000 13,500 18,000 Meters

Semua keadaan itu lah yang kemudian menjadi penyebab wajar terjadinya banjir di sekitar Bandung Selatan. Paling tidak 3 kecamatan selalu tergenang air di tiap tahunnya. Terlepas dari padatnya pemukiman di sana saat ini, kondisi geografis dan iklim sudah menjadi rasionalisasi sederhana kenapa banjir selalu terjadi. Bahkan tercatat pada

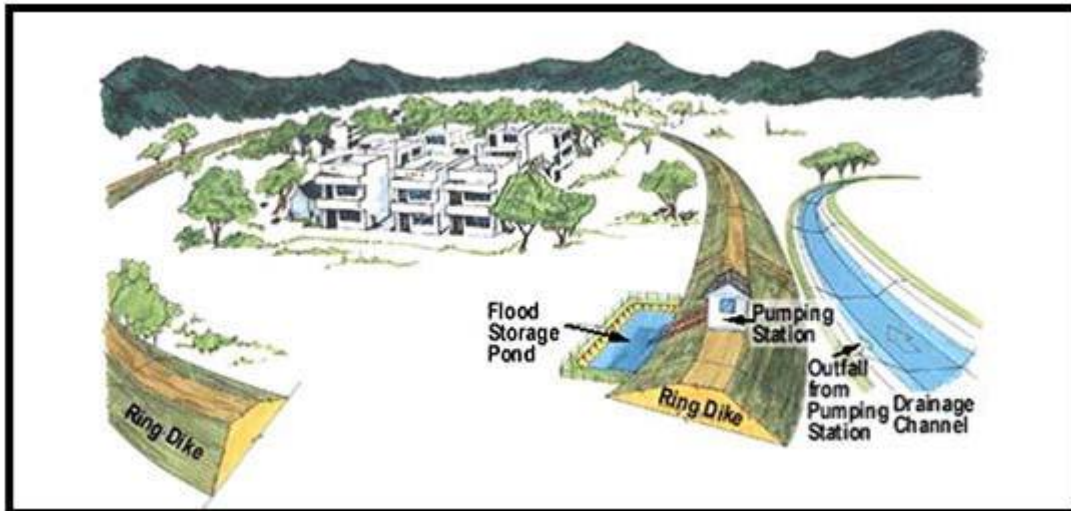
1931 banjir sudah mulai menggenangi daerah Citarum Hulu ini. Berbagai cara mungkin sudah diupayakan, namun pada akhirnya kenyataannya banjir selalu menjadi langganan. Bila tidak segera dicari penanganan atau solusi yang signifikan, banjir akan terus menghiasi hari-hari masyarakat Bandung Selatan tiap tahunnya.

Lantas Solusinya?

Melihat pemaparan sebelumnya, kita paling tidak telah melihat ada beberapa akar sebab. Yang pertama adalah genangan yang tercipta karena rendahnya elevasi lahan ketimbang elevasi permukaan sungai, sehingga ketika air sungai meluap, air justru akan turun ke daratan dan menciptakan genangan yang tidak bisa langsung surut walaupun air sungai sudah tidak meluap. Selain itu, genangan tercipta karena tutupan lahan di sekitar DAS membuat air tidak bisa terserap ataupun teralirkan semestinya. Sebab kedua adalah luapan sungai Citarum yang disebabkan kapasitas air sungai yang tidak sebanding dengan debit air yang mengalir ketika musim hujan. Terakhir, sebab yang paling ekstrim adalah ketidaksesuaian tata ruang DAS Citarum

yang seharusnya tidak pantas dijadikan kawasan pemukiman.

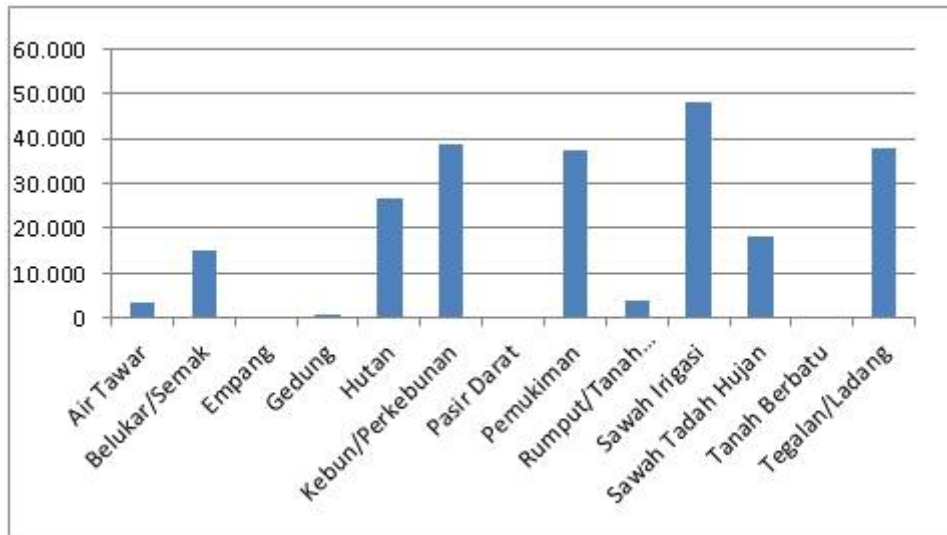
Untuk permasalahan yang pertama, salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah pembangunan kolam tampungan banjir dengan sistem pompa atau secara umum disebut dengan sistem polder. Dengan sistem polder ini, daerah dengan elevasi rendah akan dilindungi dengan dinding melingkar untuk menahan aliran air dari luar. Di dalam sistem tersebut, dibangun suatu kolam yang digunakan untuk menampung air larian akibat hujan lokal di daerah tersebut yang tidak bisa mengalir ke mana-mana. Air yang tertampung di kolam (biasa disebut kolam retensi) ini akan dikeluarkan ke sungai dengan menggunakan pompa.



Walaupun pemerintah Jawa Barat sudah terus mendesak pembangunan kolam retensi di daerah Cieunteung, hal ini juga tidak bisa sepenuhnya dijadikan solusi utama. Apalagi untuk membangun kolam retensi, diperlukan pembebasan lahan yang cukup luas. Kolam retensi bisa menjadi sebuah solusi, namun tidak bisa menjadi solusi satu-satunya. Karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Walhi Jawa Barat, kemampuan kolam retensi menampung air tidak akan maksimal karena hanya 12 hektar, sedangkan debit air Citarum berada di atas itu. Maka diperlukan solusi tambahan untuk menunjang kolam retensi ini.

Elevasi lahan di sekitar hulu yang lebih rendah ketimbang permukaan sungai ketika banjir sebenarnya juga tanpa sebab. Padatnya pemukiman

beserta pabrik-pabrik industri di sekitar wilayah tersebut merupakan salah satu faktor yang memperparah hal tersebut. Bangunan di sana, terutama pabrik-pabrik besar, menyedot air dari dalam tanah dalam jumlah yang cukup banyak sehingga mengakibatkan *land subsidence* atau penurunan muka tanah. Hal ini terjadi karena ketika air tanah terus disedot keluar, lapisan air tanah jadi berkurang sehingga lapisan batuan di atasnya turun. Daya serap tanah wilayah itu pun sangatlah minim sehingga air-air tanah tidak bisa kembali mengisi lapisan air tanah. Mengingat hal ini, dirasa memang sangat diperlukan untuk mengatur ulang tata guna lahan di sekitar DAS Citarum Hulu agar penurunan muka tanah yang terjadi dapat dikurangi sehingga tidak memperparah cekungan yang mengakibatkan genangan banjir.



Data Sebaran Pemanfaatan Lahan DAS Citarum Hulu (2010)

Untuk yang sebab kedua, satu-satunya solusi adalah meningkatkan kapasitas sungai Citarum. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara yang sering dikenal dengan normalisasi sungai, yaitu pelebaran badan sungai, atau pengerukan untuk menambah kedalaman. Pelebaran badan sungai sudah mulai sukar dilakukan karena daerah tepi sungai sekitar Citarum hulu sudah dipadati penduduk sehingga pelebaran akan memakan biaya banyak untuk pembebasan lahan. Pengerukan sendiri membutuhkan biaya yang cukup besar karena memang bukan hal yang mudah dilakukan mengingat alat pengeruk harus bisa menggapai dasar sungai. Kecuali kita memiliki teknologi lain untuk pengerukan selain dengan eskavator sederhana, pengerukan dasar sungai akan menjadi kesulitan tersendiri. Sebenarnya normalisasi sungai tidak hanya sekedar melebarkan atau mengeruk sungai, tapi juga pembangunan tanggul dan sudetan (anak sungai baru), namun untuk

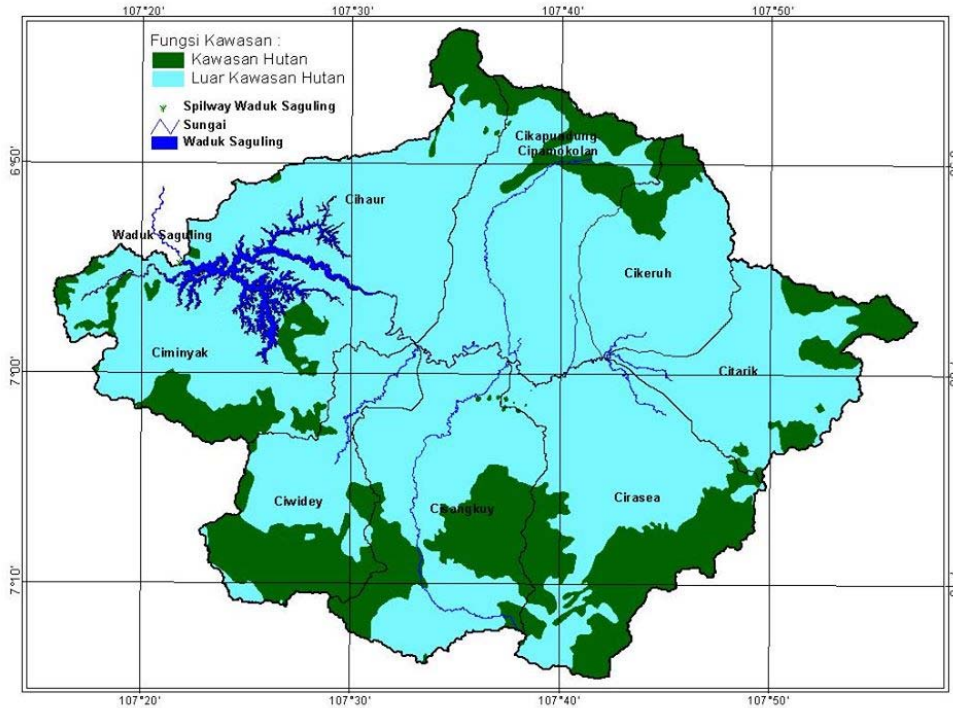
pembangunan sudetan sendiri sama sulitnya dengan pelebaran.

Peningkatan kapasitas sungai dengan pengerukan ataupun pelebaran sendiri tidak akan bisa menjadi solusi yang berpengaruh signifikan bila tidak diiringi dengan solusi-solusi lainnya. Apa yang menyebabkan kapasitas Citarum berkurang adalah pendangkalan akibat sedimentasi ataupun erosi. Kedua hal ini terjadi karena tata guna lahan yang kurang tepat di daerah sekitar hulu Citarum ataupun anak-anak sungainya. Seperti misalnya limbah dari Cikampung yang berasal dari pembangunan besar-besaran di Kawasan Bandung Utara (KBU) memberi sumbangan sedimentasi cukup besar ke hulu sungai Citarum. Walaupun dasar sungai diusahakan untuk dikeruk pun, selama sedimentasi dan erosi ini terus terjadi, pendangkalan pun akan juga terus terjadi dan kembali menurunkan kapasitas sungai. Selain itu, sampah sebagai penyebab lain menurunnya kapasitas air Citarum juga memerlukan

perubahan budaya dan mental dari masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga kebersihannya.

Untuk sebab terakhir, sebenarnya ada satu solusi praktis yang bisa diberikan, yakni relokasi seluruh masyarakat di wilayah cekungan Bandung dan membiarkan tempat itu memang untuk tergenang air. Bahkan lebih lanjut, genangan air yang muncul bisa dimanfaatkan lebih dengan menyengajakan pembuatan waduk atau hal-hal lain yang mungkin lebih bermanfaat. Hal ini sebenarnya cukup logis mengingat baik secara geografis maupun iklim sendiri, wilayah cekungan Bandung adalah wilayah yang secara pasti akan tergenang air ketika musim hujan sehingga wilayah itu tidak pantas untuk dijadikan kawasan pemukiman. Namun tentu hal itu bukanlah solusi yang semudah itu bisa dilakukan. Banyak resiko dan hambatan yang muncul untuk melakukan tindakan seekstrim itu. Merelokasi masyarakat adalah hal lain lagi yang bisa menjadi polemik berkepanjangan. Sedangkan pembangunan ulang kawasan itu, yang mana sudah dipadati pemukiman, dengan waduk atau hal lainnya juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Pemerintah mungkin sudah melakukan beragam upaya untuk masalah banjir ini. Gerakan Citarum Bestari (Bersih, Indah, Sehat, dan Lestari) yang digalakkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat sejak 2015 kemarin mungkin bisa menjadi satu usaha tersendiri yang perlu didukung bersama. Dengan beragam program yang dicanangkan, sungai Citarum memang perlu segera mendapatkan perhatian lebih mengingat ini sungai dengan memiliki banyak potensi namun sayang kenyataannya justru menjadi sungai terkotor. Kasus terbaru bahkan mengatkan bahwa terdapat tumpukan sampah padat hingga 500 ton yang menutupi aliran anak sungai Citarum di perbatasan wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Selain masalah sampah, sudah jelas bahwa tata guna lahan sekitar hulu Citarum perlu diperbaiki. Dari data tahun 2010 tercatat bahwa kawasan hutan pada DAS Citarum Hulu hanya 60,835 hektar dari total 227,446 hektar luas DAS. Hal ini berarti hanya sekitar 26,75% luas DAS yang menjadi kawasan hutan dan akan terus berkurang hingga tahun ini. Padahal dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar sendiri tertulis bahwa luas kawasan hutan minimal 30% dari luas DAS.



Terlihat bahwa masalah banjir di Bandung Selatan merupakan permasalahan yang tidak sederhana. Mulai dari kesadaran masyarakat dalam merawat sungai hingga tata ruang Jawa Barat sendiri perlu dibenahi. Bahkan masalah pembangunan di Bandung Utara pun ikut berkontribusi dalam permasalahan banjir ini. Solusi yang bisa diberikan sebenarnya bisa dibagi menjadi dua, yakni upaya struktural, seperti pembangunan kolam retensi ataupun pengerukan, dan upaya nonstruktural, seperti edukasi ke masyarakat ataupun pembersihan sungai. Namun, keduanya sama-sama membutuhkan dana yang tidak sedikit. Gerakan Citarum Bestari dalam format baru di 2016 pun memakan dana hingga 120 miliar rupiah. Itu pun belum menyelesaikan masalah utama secara permanen. Terkait upaya non struktural sendiri pun membutuhkan kolaborasi dari banyak pihak mengingat

sungai Citarum merupakan milik bersama.

Jika melihat kembali kondisi alamnya, tidak mudah benar-benar menyelesaikan permasalahan banjir bandung selatan hingga tuntas. Air seakan sudah ditakdirkan untuk menggenang di sana. Kolam retensi ataupun upaya-upaya lainnya pun hanya membantu mengurangi resiko, bukan menyelesaikan permasalahan. Mungkin bisa saja relokasi masyarakat di cekungan Bandung bisa jadi pertimbangan, walaupun sangat jauh dari feasibilitas. Selama ini sendiri pun, seakan tidak ada komunikasi yang baik antar komponen-komponen utama yang mungkin berperan, seperti pemerintah, akademisi, LSM, maupun masyarakat. Yang masyarakat lain ketahui hanyalah berita tahunan bahwa bandung selatan kembali tergenang banjir, beragam bantuan pun dikirimkan, musim hujan selesai,

masyarakat lupa lagi, dilanjutkan musim hujan berikutnya, dan seterusnya.

Apakah mungkin kita bisa memutus rutinitas tahunan ini? Entahlah. Semua solusi yang dijelaskan sebelumnya juga bukanlah merupakan solusi utama, karena pada akhirnya banjir akan tetap ada dan tiap tahun tim SAR dan beragam relawan pun harus siap turun lagi. Di dunia akademis, banjir

selatan mungkin pernah jadi topik bahasan, tapi entah jadi apa. Di wilayah pemerintah, beragam program pun disiapkan, tapi juga entah hasilnya seperti apa. Ya, sepertinya semua dunia sibuk sendiri ketika padahal masalahnya sama.

Bingung? Iya, tapi aku bisa apa? Aku hanyalah mahasiswa matematika yang senang menulis.

Menteri Pusat Studi Arsip dan Kajian Kebijakan Kabinet KM ITB 2016

PHX





PKI Bangkit, Lelucon kah?

2 hari yang lalu, 18 tahun reformasi menjadi refleksi bersama, 3 hari yang lalu 108 tahun lahirnya Boedi Oetomo menjadi tonggak momentum kebangkitan nasional. Dari dua hari bersejarah bulan Mei tersebut, keadaan yang terjadi justru malah anomali dalam kebebasan berekspresi. Bukannya memikirkan bagaimana Indonesia bangkit, yang beredar malah komunisme yang bangkit. Aku pun tergerak untuk sekedar menuliskan beberapa hasil obrolan dengan pegiat literasi, penjual buku, hingga dosen mengenai keadaan ini.

Tak ada hujan tak ada angin, tiba-tiba isu mengenai bangkitnya komunisme muncul begitu saja entah darimana. Hal ini pun kemudian diikuti serangkaian tindakan yang tidak masuk akal, dimulai dari menangkap orang-orang yang beratribut palu arit hingga penyitaan buku-buku bernuansa kiri. Beragam respon pun tercipta menanggapi, seperti adanya Pernyataan Bandung yang menolak pemberangusan

buku atas nama puluhan penggiat literasi, sastrawan, penulis, dan budayawan. Beberapa pihak memilih untuk diam dan mengambil wilayah aman, menganggap ini hanyalah permainan isu yang selalu terjadi di percaturan kepentingan di Indonesia. Spekulasi-spekulasi menghiasi. Berbagai pertanyaan secara wajar muncul menyikapi: Ada apa gerangan?

Asal Mula

Untuk memahami keadaan, mungkin kita perlu menyelidiki sedikit mengenai rangkaian pola yang menghiasi fenomena yang menarik ini. Mulai munculnya buku-buku, tulisan-tulisan, maupun diskusi-diskusi mengenai paham kiri atau semacamnya sebenarnya sudah muncul sejak lama. Runtuhnya orde baru pada 1998 merupakan momen dimenangkannya kembali kebebasan berekspresi ke tangan rakyat. Diiringi penyesuaian aturan secara bertahap, masyarakat lebih bebas untuk mengeluarkan ekspresi masing-masing tanpa harus was-was ataupun khawatir akan represi aparat pemerintah yang dulunya menghantui.

Beberapa contoh penyesuaian aturan itu adalah amandemen kedua UUD 1945 yang membubuhkan pasal 28F yang berisi *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."* Selain itu, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membuka ruang lebih pada tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun. Beberapa tahun kemudian, pada 2003,

aturan yang menjadi dasar dilarangnya paham komunisme yakni TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 pun disesuaikan dengan munculnya TAP MPR No. 1 Tahun 2003 yang lebih menghaluskan pelarangan tersebut agar sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM.

Mengenai komunisme atau PKI sendiri pun, beragam diskusi, tulisan, atau bahkan film bermunculan dengan semangat mencari kebenaran yang selama ini dipenjara doktrin dan kediktatoran orde baru. Kita sudah ketahui berbagai film dokumenter dirilis dalam rangka menyingkap fakta-fakta yang selama orde baru tertimbun dalam tekanan pemerintah, dari *Shadow Play* karya Chris Hilton yang mengungkap bagaimana tragedi 1965 direkayasa, hingga *Senyap* karya Joshua Oppenheimer yang bertemakan pembantaian massal 1965. Dalam wilayah literasi sendiri pun tidak sedikit buku-buku yang membahas beragam perspektif mengenai tragedi 30S, paham komunisme, ataupun PKI sendiri. Semua kebenaran muncul perlahan-lahan untuk menyembuhkan masyarakat dari kerancuan keyakinan terhadap sejarah.

Epidemi buta sejarah yang akut melanda mayoritas masyarakat Indonesia paska orde baru menjadi hal wajib yang perlu segera ditangani. Mengingat sejarah menjadi sebuah gua gelap yang terjaga ketat selama orde baru, sebenarnya mencari kebenaran sejarah sudah menjadi hal yang sangat dinantikan bagi mereka yang masih punya kesadaran akademis atau minimal

rasa untuk mempertanyakan. Apalagi bagi generasi-generasi muda yang tidak terlalu merasakan propaganda orde baru, tragedi 1965, komunisme, dan hal-hal semacamnya sudah secara wajar menjadi objek kehausan mereka akan pengetahuan dan wawasan baru. Namun, sayang merehabilitasi hasil cuci otak besar-besaran selama 30 tahun bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Seperti apa yang telah ku jelaskan pada tulisan lain ([Palu dan Arit](#)), 30 tahun orde baru adalah waktu yang cukup untuk membuat sejarah dan realita menjadi hal yang sukar dibedakan. Apa yang didoktrin dan dipropagandakan oleh pemerintahan orde baru menjadi kebenaran teryakini yang tak boleh dibantah atau sekedar dipertanyakan. Hal ini seperti apa yang dianalogikan oleh Plato dalam bukunya *Politeia* yang menjelaskan mengenai bagaimana persepsi mempengaruhi realitas manusia:

"Maka adalah sebuah gua, di mana ada beberapa tawanan yang diikat menghadap ke dinding belakang gua. Mereka sudah berada di sana seumur hidup dan tidak bisa melihat ke mana-mana, hanya bisa melihat ke depan saja. Akan tetapi mereka bisa melihat bayang-bayangan orang di dinding belakang gua. Bayang-bayangan ini disebabkan oleh sebuah api yang berkobar di depan, di lubang masuk ke gua ini dan orang-orang di luar gua yang berjalan berlalu lalang. Para tawanan bisa melihat bayang-bayangan orang ini dan suara-suara mereka yang menggema di dalam gua.

Maka pada suatu hari, salah seorang tawanan dilepas dan dipaksa keluar. Ia disuruh melihat sumber dari bayangan ini semua. Akan tetapi api membuat matanya silau, ia lebih suka melihat bayangannya. Lama kelamaan ia bisa melihat api dan lalu ia mulai terbiasa dan melihat orang-orang yang lalu lalang. Kemudian ia keluar dan melihat matahari (simbol daripada kebenaran), yang sebelumnya hanya sedikit bayangannya yang terlihat, sungai, padang dan sebagainya.

Lalu ia dipaksa kembali ke gua lagi dan hal pertama yang akan dilakukannya adalah membebaskan kawan-kawannya. Akan tetapi

kawan-kawannya akan marah karena hal ini akan mengganggu ilusi mereka. Akhirnya mereka bukannya terima kasih tetapi akan sangat marah dan membunuhnya."

Kebenaran yang diketahui masyarakat adalah kebenaran yang selama ini diberikan selama 30 tahun pemerintahan orde baru, ya bahwa komunisme terkait dengan pemberontak, musuh pancasila, ateis, dan stigma-stigma buruk lainnya. Kebenaran lain justru yang akan dianggap palsu dan salah.

Pelanggaran Kebebasan Berekspresi

Semangat reformasi 1998 sesungguhnya adalah semangat memperbaiki seluruh tatanan masyarakat, termasuk dalam hal pola berpikir dan kebebasan berekspresi. Banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan paska runtuhnya orde baru. Hal ini pun membuat isu komunisme tenggelam dalam berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ketika muncul diskusi-diskusi atau buku-buku mengenai paham komunisme pun, hal tersebut tidak menjadi *viral* dan hanya menjadi konsumsi orang-orang tertentu saja. Namun mengingat betapa kuatnya tertanam, ketakutan terhadap komunisme tidak sepenuhnya hilang, namun menjadi *dormant* tersimpan dalam benak masyarakat, apalagi yang tidak bersentuhan dengan wilayah akademis. *Dormant* dalam hal ini berarti bahwa ide tersebut tertidur, namun suatu waktu akan mudah terpicu untuk aktif kembali.

Selama bertahun-tahun sejak reformasi 1998, masyarakat hidup dengan ide anti-komunis yang *dormant* ini. Kalaupun ada tindakan-tindakan seperti pelarangan buku, itu hanya muncul sedikit dan tidak secara besar-besaran. Tercatat oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), pada tahun 2006 ada 2 buku dilarang oleh kejaksaan, 2007 terdapat 14 buku dilarang di mana 13 diantaranya adalah buku teks pelajaran sekolah, hanya karena tidak mencantumkan kata 'PKI' di belakang 'G30S', dilanjutkan pada 2008 ada satu buku dilarang, dan 2009 terdapat 5 buku. Namun semua itu seharusnya terhenti setelah Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 membatalkan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Mengganggu Ketertiban Umum karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.

Namun, entah kenapa, tetiba dalam setahun terakhir, gagasan anti-komunisme yang selama ini Dormant aktif kembali dan merebak secara perlahan. Tercatat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET), sejak Januari 2015 hingga Mei 2016 ini, terdapat 46 kasus pelanggaran atas kebebasan berekspresi, yang mana 40 diantaranya terkait dengan isu komunisme. Pelanggaran ini terdiri dari berbagai macam bentuk, mulai dari pelarangan acara (57, 9 persen),

intimidasi (50 persen), pembubaran (21,1 persen), hingga perusakan (5,3 persen). Anehnya lagi, kuantitas kasus ini meningkat secara pesat di 2016. Hal ini terlihat dari 40 kasus yang tercatat sejak Januari tahun lalu itu, sekitar setengahnya (19 kasus) terjadi dalam rentang Februari-Mei 2016.

Lantas, tidakkah kemudian kita berpikir, ada apa gerangan dengan 2 tahun terakhir?

Antara Spekulasi dan Fakta

Memang, ketika berbagai tindakan pelanggaran kebebasan berekspresi bermunculan, terutama terkait dengan paham anti-komunisme, banyak yang mengatakan bahwa ini hanyalah pengalihan isu belaka. Seakan hal yang lumrah, pengalihan isu adalah gagasan yang selalu muncul dalam pikiran masyarakat ketika melihat fenomena di bangsa ini yang tidak bisa dijelaskan. Seakan-akan segala sesuatu di Indonesia ini adalah *by design*, dengan *invisible hand*, entah pemerintah atau bukan, yang mengontrol dan merancang segala kejadian yang ada. Spekulasi seperti itu wajar terjadi ketika selalu ada *dark side of the moon* yang tidak pernah bisa diketahui publik mengenai apapun fenomena yang terjadi di negara ini.

Tapi terlepas dari spekulasi tersebut, marilah coba kita mencari tahu.

Tingkat kasus pelanggaran kebebasan berekspresi tercatat mulai muncul sejak awal 2015. Jika kita tarik

mundur, apa yang cukup besar terjadi sebelum 2015, alias tahun 2014 adalah Pemilihan Umum, yang mana memenangkan pasangan Joko Widodo – Yusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk memimpin hingga 2019. Dari visi-misi dan beragam janji serta program yang dijanjikan Jokowi selama kampanye pada Pemilu 2014, salah satunya adalah bahwa beliau berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu. Hal tersebut tertulis jelas pada dokumen visi-misi beliau yang mana berbunyi:

“Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia, seperti Kerusuhan Mei (1998), Trisakti-Semanggi I dan II, Penghilangan Orang secara Paksa (1997-1998), Talangsari-Lampung (1989), Tanjung Priok (1984), Tragedi 1965-1966.”

Jelas disebutkan bahwa tragedi 1965 yang selama ini masih menjadi kabut tebal dalam pengetahuan sejarah masyarakat Indonesia termasuk dalam kasus yang harus diselesaikan, padahal kasus tersebut adalah kasus yang sangat sensitif. Bahkan karena janji tersebut, selama Pemilu 2014 kemarin beredar beragam kampanye hitam yang menuduh Jokowi sebagai pendukung PKI. Hingga akhirnya beliau menang pada pertarungan politik tersebut, mau tidak mau, janji pun harus dilaksanakan.

Entah kenapa pada waktu yang cukup dekat, film dokumenter karya Joshua Oppenheimer berjudul *Senyap* atau *Look of Silence* rilis dan mulai diputar pertama kali di Indonesia secara serentak pada 10 Desember 2014 dalam rangka memperingati hari HAM sedunia. Tentu saja hal ini tidak terjadi tanpa ada hambatan apapun. Beragam intimidasi terjadi terhadap pemutaran film ini di berbagai tempat yang mana salah satunya adalah Universitas Brawijaya, bahkan hingga berujung pada pembatalan pemutaran. Respon selanjutnya adalah pada 29 Desember 2014 Lembaga Sensor Film (LSF) mengeluarkan surat yang menolak film *Senyap* seutuhnya, melarang pemutaran film *Senyap* untuk umum dan di bioskop. Walaupun begitu, beberapa pemutaran tetap lancar dilakukan, LSF sendiri pun memperbolehkan pemutaran selama dalam lingkungan terbatas.

Pada awal 2015, dari sisi legislasi, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia pun mulai gerak dengan pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). RUU ini pun menjadi salah satu dari 159 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR RI periode 2015-2019. Tentu, ini adalah langkah penting karena tanpa landasan perundang-undangan, janji Jokowi di atas tidak akan bisa tercapai dengan maksimal.

Beragam isu pun mulai menyebar mengenai bahwa usaha rekonsiliasi ini akan berujung pada permintaan maaf Jokowi pada korban kasus 1965. Bahkan sekitar Juli beredar kabar bahwa Jokowi akan meminta maaf pada keluarga PKI pada pidato kenegaraan 14 Agustus 2015 di hadapan DPR RI. Kabar yang sempat menjadi perbincangan di masyarakat itu pun akhirnya tidak terbukti dengan tidak disebutkan apapun mengenai PKI pada pidato tersebut di kemudian hari. Seiring dengan isu yang menyebar, satu per satu kasus mengenai perlawanan terhadap paham komunisme pun muncul. Pada kurun waktu singkat, Januari hingga April 2015, tercatat ada 8 kasus intimidasi dan pelarangan kegiatan pemutaran film *Senyap* di berbagai tempat paska rilisnya pada 10 Desember. Selain itu merenteng berbagai kasus lain mewarnai 2015 diiringi dengan isu permintaan maaf pemerintah terhadap korban 1965 yang juga terus muncul.

Di akhir 2015, tepatnya pada 10-13 November 2015, sekelompok aktivis HAM menggelar *International Peoples' Tribunal* di Den Haag, Belanda, meminta

pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas tragedi 1965. Hal ini semakin menghangatkan pro-kontra mengenai apakah pemerintah harus meminta maaf atau tidak kepada korban 1965. Hingga akhirnya, frekuensi kasus-kasus tekanan terhadap apapun yang berbau komunisme, atau lebih luas lagi, berbau kiri, pun meningkat drastis setelah pemerintah melalui Kementerian Koordinator Polhukam memfasilitasi Simposium Nasional yang bertemakan "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan". Simposium ini sesungguhnya digagas oleh Gubernur Lemhannas, Letjen (Purn) Agus Widjojo yang mana kemudian juga menjadi ketua panitia pengarah acara yang dilaksanakan pada 18-19 April 2016 di Hotel Aryaduta tersebut.

Jelas, acara seperti ini langsung ditentang oleh beragam pihak, terutama yang sangat keras menyuarakan akan bahaya bangkitnya komunisme. Ketika simposium itu dibuka, massa yang tergabung dalam Front Pancasila, berunjuk rasa di depan lokasi. Front Pancasila sendiri merupakan himpunan dari beberapa organisasi, seperti Pelajar Islam Indonesia, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Laskar Sapu Jagat, Gerakan Nasional Patriot Indonesia, *Center for Indonesian Community Studies*, dan Front Pembela Islam. Penolakan juga terjadi dari beberapa purnawirawan Jendral, khususnya TNI AD. Beberapa menganggap simposium ini akan

memicu kebangkitan PKI. Beragam ormas pun merapat dan mengadakan beragam forum dan pertemuan untuk membahas hal ini.

Yang akhirnya membuat kepala geleng-geleng adalah rencana pengadaan simposium 'tandingan' pada awal Juni bertemakan "Mengamankan NKRI dari Bahaya Komunisme" yang digagas oleh Gerakan Bela Negara bersama sekitar 200 purnawirawan tentara dan polisi beserta beragam ormas pada pertemuan 13 Mei 2016. Ditambah lagi, simposium itu akan diikuti dengan rencana peresmian organisasi bernama "Barisan Ganyang PKI" yang merupakan gugus tempur dan akan bermain fisik. Beragam perlawanan lainnya pun bermunculan dari berbagai penjuru sebagai respon terhadap isu bangkitnya komunisme.

Kesimpulan Simposium 1965 sebenarnya menyatakan bahwa negara terlibat dalam peristiwa tersebut. Namun tentu hasil ini menuai respon yang bermacam-macam, beberapa pihak masih menyatakan diri menunggu hasil resmi, beberapa pihak lain menolak hasil tersebut. Simposium ini pun semakin memperpanas pro-kontra permintaan maaf pemerintah terhadap korban PKI. Hal ini ditambah dengan kuburan massal yang ditemukan oleh KontraS sebagai bukti terjadinya pelanggaran HAM 1965.

Apakah pola itu cukup untuk menjelaskan keadaan? Ku rasa tidak.

Ideological State Apparatus

Apa yang terjadi pada negara kita sekarang saat ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kuasa tidak lagi terpusat pada negara namun masih tetap menjaga masyarakat dalam kontrol, entah langsung ataupun tidak. Ketika terjadi pembubaran atau intimidasi kegiatan dari organisasi kemasyarakatan, pemerintah sebagai yang seharusnya punya kuasa tidak melakukan banyak hal untuk benar-benar menindak dan menjaga agar masyarakat tetap berada dalam suasana demokratis. Kuasa terpusat menjadi terbagi-bagi dalam kuasa-kuasa kecil namun tetap dominan dalam kontrol masyarakat. Pangung pemerintah sekarang adalah panggung citra, sehingga kuasa terpusat bukan lagi hal yang pantas untuk dipakai selayaknya orde baru.

Hal ini pun mengarah suatu konsep yang dikenalkan seorang Marxis Perancis bernama Louis Althusser mengenai bagaimana negara bertindak untuk menjaga kekuasaannya. Dalam sebuah esai yang diulis oleh Althusser pada 1970 berjudul *Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes towards an Investigation)*, Althusser mengemukakan teorinya mengenai ideologi dan bagaimana ideologi dijadikan senjata untuk mempertahankan kuasa. Teori ideologi yang dikemukakan oleh Althusser belandaskan dua tesis. Pertama, bahwa ideologi merupakan representasi hubungan imajiner antara individu dengan kondisi eksistensinya. Yang dimaksud dari relasi imajiner di

sini lah yang dimaksud Marx sebagai *false consciousness* atau kesadaran palsu, yang mana menciptakan alienasi (keterasingan) manusia dengan realitas yang sesungguhnya. Secara sederhana hal ini dapat dilihat melalui analogi manusia gua plato yang mana manusia gua yang seumur hidupnya menghabiskan diri di gua akan terasingkan dari realitas sesungguhnya di luar gua. Ideologi yang mereka pegang pun hanyalah sekedar relasi mereka dengan dinding-dinding gua. Tesis kedua Althusser menyatakan bahwa representasi ide yang membentuk ideologi tidak hanya memiliki eksistensi spiritual, tapi juga eksistensi material. Artinya, ideologi pasti akan terejawantahkan dalam bentuk materi yang terwujud dan nyata, seperti tindakan ataupun benda.

Selanjutnya, Althusser menjelaskan bahwa negara untuk mempertahankan kuasanya membutuhkan aparat-aparat negara, namun aparat ini tidak mesti dalam bentuk lembaga buatan pemerintah, tapi juga bisa terimplementasikan dalam kuasa-kuasa kecil seperti organisasi kemasyarakatan, media, atau sekolah. Dalam hal ini, ia pun membagi dua macam aparat negara (*State Apparatus*), yaitu *Repressive State Apparatus* (RSA) dan *Ideological State Apparatus* (ISA). RSA terdiri dari tentara, polisi, pengadilan, dan sebagainya, yang mana menjalankan fungsinya dengan kekerasan, baik fisik maupun non fisik, sedangkan ISA terdiri dari beragam

macam institusi yang mana menjaga kekuasaan dengan ideologi.

Perbedaan mendasar antara dua bentuk aparatus ini adalah bahwa RSA cenderung merupakan satu kesatuan yang terdominasi oleh pemerintah, sedangkan ISA terbagi banyak dan plural, yang mana secara formal berada di luar kontrol pemerintah namun mengantarkan nilai-nilai yang sesuai dengan pemerintah untuk menjaga keteraturan dari dalam. ISA memiliki banyak bentuk, bisa agama, sekolah, maupun budaya. Ketika RSA secara jelas memperlihatkan kuasanya dengan tekanan/represi sehingga ia akan menjadikan ketakutan terhadap kekerasan sebagai senjata untuk menciptakan kepatuhan masyarakat, ISA cukup memanfaatkan ideologi dan

keyakinan yang dimiliki masyarakat. RSA dan ISA sebenarnya tidak pernah berbentuk terpisah. Sebuah aparat pasti memiliki fungsi ISA dan RSA sekaligus, tidak bisa murni represif atau murni ideologis. Semua bergantung pada dominansi fungsi yang terpakai.

Indonesia masa orde baru sangat dominan menggunakan RSA melalui ABRI yang mana terus menerus mereproduksi kuasanya dengan represi. ISA digencarkan dengan propaganda-propaganda dan doktrin P4 melalui sekolah-sekolah, pelatihan-pelatihan, ataupun media-media lainnya. Ideologi anti-komunis ditanamkan secara perlahan melalui sektor-sektor privat ISA mengiringi tekanan RSA pada sektor publik.

Mencari Pola

Setelah reformasi terjadi, pemerintah tidak lagi bisa menampilkan diri secara terbuka sebagai pihak yang menekan. Politik citra yang menjadi wajah utama demokrasi kita saat ini membuat pemerintah tidak bisa seenaknya menggerakkan institusi-institusi seperti polisi sebagai musuh masyarakat. Hal ini tentu membuat kekerasan tidak lagi bisa diandalkan secara langsung oleh pemerintah. Maka kemudian pemerintah pun mentransformasikan fungsi RSA dari aparat formal ke aparat informal seperti organisasi kemasyarakatan dengan tetap mempertahankan fungsi ideologis melalui pemanfaatan keyakinan

masyarakat (dalam konteks Indonesia, paling utama adalah agama).

Itulah kenapa dalam kasus-kasus mengenai pembubaran ataupun intimidasi kegiatan-kegiatan kiri, aparat formal pemerintah tidak pernah jadi garda terdepan, namun selalu ormas-ormas, yang mana ketika melakukan tindakan represif, aparat formal tidak akan berbuat banyak. Apalagi sebenarnya muncul kabar mengenai bahwa salah satu ormas yang rajin melakukan tindakan represif, Front Pembela Islam, merupakan buatan TNI untuk jadi 'tukang pukul' atau 'kambing hitam' pemerintah agar aparat formal

bisa cuci tangan dan terjaga citranya di mata masyarakat. Hal seperti ini memang masih sebatas teori ataupun spekulasi yang perlu diriset kembali lebih lanjut. Tapi melihat pola fenomena yang ada, seperti inkonsistensi dalam represi, imunitas terhadap aturan, maupun ketidakjelasan pemikiran, cukup sukar menafikan argumen bahwa ormas-ormas intoleran yang selama ini rajin menekan masyarakat bukanlah manipulasi pemerintah.

Tentu akan sangat mudah mengontrol dan menekan masyarakat karena ormas-ormas ini punya dua fungsi dominan sekaligus, RSA dan ISA. Mereka akan punya banyak alasan untuk menekan dengan ideologi-ideologi yang ada, seperti atas nama agama atau pancasila, sekaligus bisa melakukan kekerasan namun tetap imun terhadap aturan. Kalaupun pemerintah tidak punya kontrol langsung terhadap ormas-ormas terkait, pemanfaatan ideologi dan keyakinan bisa dengan mudah dilakukan terhadap mereka. Sentilkan saja gagasan bahwa PKI akan bangkit, gelombang penolakan akan langsung muncul mengingat gagasan ini sudah *dormant* dalam pikiran masyarakat.

Terkait pemberangusan buku-buku kiri yang akhir-akhir ini muncul, Majalah Tempo pada edisi 16-22 Mei ini menjelaskan bahwa hal ini bermula dari pertemuan Jokowi dengan empat kepala lembaga (mantan) RSA: Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan KASAD. Pertemuan ini didasari keluhan dari masyarakat dan sejumlah tokoh agama

yang diterima oleh Jokowi mengenai maraknya atribut berbau komunis. Dijelaskan dalam laporan utama Tempo itu pun bahwa muncul dua laporan intelijen yang diterima Presiden: (1) Ada kelompok yang sengaja menciptakan berbagai atribut PKI untuk menciptakan keresahan, yang mana setelah menyebar, kelompok itu pula yang meributkan hal tersebut, dan (2) Ada kelompok yang memang berusaha menghidupkan kembali PKI. Yang dimintai Presiden Jokowi kemudian adalah menindak dua kelompok tersebut, yang dijadikan dasar instruksi bagi empat lembaga tersebut untuk menjadi RSA lagi. Akhirnya karena komentar-komentar bermunculan bahwa pemerintahan Jokowi menjadi bernuansa orde baru, Presiden kemudian meminta agar keempat lembaga tersebut, terutama TNI dan Polri, untuk tidak kebablasan.

Dari berita tersebut sebenarnya cukup aneh bila kita melihat bahwa semua ini hanyalah rekayasa pemerintah, mengingat Jokowi seperti *plin plan*. Maka tentu ada kuasa lain yang bermain.

Di antara semua masyarakat yang terdoktrin oleh anti-komunisme ala orde baru, doktrin terkuat ada di tubuh TNI AD. Kenapa? Karena jelas, doktrin adalah landasan utama militerisme. Tanpa doktrin, prajurit hanya akan jadi pembangkang yang selalu bertanya. Apalagi dalam konteks sejarah, tragedi 1965 yang mana 7 jenderal terbunuh merupakan luka tersendiri. Sehingga paska reformasi sendiri pun, doktrin anti-komunisme akan terus kental

ditanamkan dalam tubuh TNI AD. Jika muncul pertanyaan, kenapa angkatan darat? Karena yang berurusan dengan teritori masyarakat adalah angkatan darat ketika angkatan laut dan udara lebih sibuk mengurus perbatasan ataupun pertahanan dari luar.

Ketika Simposium 1965 dicetuskan oleh Agus Widjojo, beliau mengatakan bahwa kelompok yang paling kentara menolak simposium tersebut adalah tentara angkatan darat. Banyak purnawirawan TNI yang awalnya diundang pun secara terbuka menolak dengan tetap menganggap bahwa PKI itu

pemberontak. Hal ini pun memecah internal TNI AD sendiri, terutama para purnawirawan. Bahkan internal pemerintah sendiri pun bisa beda pendapat. Ketika Luhut Binsar mendukung penuh Simposium 1965, Ramyzad Ryacudu justru sebaliknya, mendukung simposium tandingan yang diadakan gabungan Gerakan Bela Negara bersama ormas-ormas dan purnawirawan TNI-Polri. Apalagi ketika semakin menguatnya wacana mengenai bahwa pemerintah harus minta maaf pada korban 1965, isu kebangkitan PKI menguat dengan intensitas yang sama.

Lantas Bagaimana?

Banyak spekulasi bisa muncul. Salah satunya adalah bahwa semua ini hanya implikasi dari konflik internal TNI AD mengenai rekonsiliasi 1965 dan permintaan maaf pemerintah terhadap korban, atau kemungkinan lain adalah semua ini hanya *by design* untuk kemudian kelak memunculkan kebutuhan akan kebenaran sehingga RUU KKR bisa ditekan untuk dipercepat dibahas dan disahkan oleh DPR RI. Entah kuasa mana yang berperan, yang jelas ormas-ormas ataupun masyarakat umum hanyalah alat sekaligus objek, aparat ideologis atau ISA yang menyusupkan nilai-nilai yang diinginkan pemerintah tanpa sadar.

Terlepas dari kebenarannya seperti apa, toh semua masih hanya kira-kira, ketika mempelajari semua fenomena yang terjadi sekarang ini, aku jadi hanya merasa korban yang bisa melihat dan

mencari tahu seadanya. Mengapa? Karena ketika kepentingan memancing gagasan anti-komunis masyarakat yang *dormant* tapi kemudian aktif kembali, apa yang bisa kita lakukan? Bereaksi dengan kemudian membuat pernyataan sikap, diskusi, atau semacamnya? Mungkin itu perlu, tapi mungkin juga tidak. Karena apalah artinya jika hanya tindakan-tindakan responsif yang kemudian tidak berdampak apa-apa. Jika penyebab konflik selesai, pastilah isu ini akan dingin dengan sendirinya. Bisa saja memang perjuangan dilanjutkan dengan menuntut pemerintah ataupun DPR untuk memperbaiki semua aturan yang berhubungan dengan hal ini, seperti segera dibahasnya RUU KKR agar kebenaran bisa segera terungkap dan meluruskan seluruh doktrin mengenai PKI yang tertancap di masyarakat selama ini.

Di tengah segala kemungkinan ini, hanya satu yang ku pikirkan, gerak apa adanya, tunggu semua generasi orde baru tersingkir dan generasi muda reformasi memegang Indonesia, maka pikiran-pikiran baru yang lebih segar dan bebas dari doktrin anti-komunisme ala orde baru bisa menghilangkan hantu-hantu ketakutan mengenai PKI dan semacamnya dari Indonesia.

Ah sudahlah. Semua ini jadi terasa hanya permainan belaka.

Menteri Pusat Studi Arsip dan Kajian Kebijakan Kabinet KM ITB 2016

PHX

Terkadang aku merasa terheran sendiri dengan semua kondisi masyarakat saat ini. Begitu absurdnya hingga semua benar dan salah telah melebur di mataku. Jikalau pun seakan aku menulis dan aku menyarankan sesuatu, aku sendiri merasa bahwa hal sebaliknya jugalah benar. Maka apakah artinya meributkan benar dan salah dalam hidup? Karena toh manusia memiliki perspektifnya masing-masing yang tak unik dan tak akan pernah terlihat yang lain. Sehingga mungkin ini terakhir kali ku menulis hal-hal aktual, membuatku merasa cukup menuliskan hal-hal abstrak yang terlepas dari persepsi benar-salah manusia yang begitu semu.

Sekalipun begitu, tak ada yang sia-sia. Realita yang terjadi terkadang begitu nyata untuk bisa dikatakan semu, sehingga akan terasa menjadi orang paling apatis jika tidak menanggapinya. Namun apatisisme itu hanyalah sisi lain dari optimalisasi hasrat dengan cara yang mungkin tak terlalu terlihat. Apapun itu, optimis saja lah!

(PHX)